



PROSIDING SEMINAR NASIONAL MANGROVE

Adaptasi Pengelolaan Pesisir Berkelanjutan; Perbaikan dan Rehabilitasi Kerusakan Pesisir Utara Jawa.

Semarang, 10 Oktober 2012



Tim Produksi

Penyusun : National Coordinating Body (NCB) MFF Indonesia
Kontributor : National Coordinating Body (NCB) MFF Indonesia
Desain & Tata letak : Dudy Nugroho
Foto sampul : Dudy Nugroho
Foto lain ini oleh : Febrian Ahmadi – Kesemat, Dudy Nugroho, M. Mazid - Direktorat Sungai dan Pantai – Kementerian PU.

© Mangrove for the Future (MFF) Indonesia, 2012

Dokumen ini dapat diperoleh di:

MFF Indonesia Programme
UNDP Office Indonesia
Menara Thamrin Building
JL. MH Thamrin, Kavling 3, Jakarta Pusat
Telp: +62 21 3141308, Tel/Fax: +62 21 3150382

Pengantar

Seminar Nasional dengan tema “Adaptasi Pengelolaan Pesisir Berkelanjutan; Perbaikan dan Rehabilitasi Kerusakan Pesisir Utara Jawa”, telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 bertempat di Hotel Novotel, Jl. Pemuda Semarang. Seminar Nasional ini direncanakan oleh National Coordinating Body (NCB) Indonesia sejak Oktober 2011 dan dimasukkan dalam Annual Working Plan (AWP) tahun 2012 dalam program kegiatan **Mangrove For the Future** (MFF) tahun 2012. Dalam perkembangannya, gagasan ini dimatangkan dengan proses diskusi internal NCB Indonesia sejak Bulan Mei 2012. Dalam pelaksanaan Seminar ini dapat berlangsung dengan baik atas kerjasama dari berbagai pihak baik ditingkat Nasional dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Bappenas dan juga dengan kolega dari tingkat Propinsi dan Kabupaten.

Pada Seminar Nasional Mangrove ini dihadiri oleh sebanyak 126 peserta yang datang dari berbagai pihak mewakili unsur: Pemerintah Nasional, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Internasional/Nasional/lokal, Organisasi/Kelompok Kemasyarakatan, Institusi Pendidikan dan Pihak Swasta.

Laporan ini merangkum pelaksanaan kegiatan dan hasil Seminar Nasional, dengan harapan informasi ini dapat diketahui oleh berbagai kalangan terutama pihak-pihak yang berkepentingan untuk kemudian dapat mengambil manfaat yang positif dan turut berperan aktif dalam Upaya Pengelolaan Wilayah pesisir Berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Kegiatan ini terselenggara atas dukungan dana melalui Program Mangrove For the Future(MFF) Indonesia Programme yang dikoordinasikan dengan anggota NCB dan mitra nasional. Secara khusus tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada Bappenas, KKP, Kementerian PU dan UNDP Indonesia yang telah mendukung kegiatan ini melalui persiapan dan pelaksanaan kegiatan Seminar yang berjalan dengan baik.

Tim Penyusun juga mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari semua pihak yang terlibat dan mendukung terselenggaranya seminar ini, yaitu:

- Seluruh Anggota NCB Indonesia (Bappenas, KKP, KLH, Kemenhut, Kemendagri, Wetlands Indonesia, LPP Mangrove, Prof. Sukristijono sebagai Ahli Mangrove)
- Propinsi Jawa Tengah dan SKPD terkait
- Pengurus LSM LPPSP Semarang
- Fakultas Perikanan dan Kelautan – UNDIP, Semarang
- Kesemat
- Semua pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini namun belum disebutkan satu persatu.

Daftar Istilah & Singkatan

Abrasi	Pengikisan daratan oleh gelombang
Bappeda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Intrusi	perembesan air laut menuju daratan melalui dalam air tanah
Kemenhut	Kementerian Kehutanan
Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri
KKMD	Kelompok Kerja Mangrove Daerah
KKMN	Kelompok Kerja Mangrove Nasional
KKP	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KLH	Kementerian Lingkungan Hidup
LPP Mangrove	Lembaga Penelitian dan Pengembangan Mangrove
LPPSP	Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MFF	Mangrove for the Future
NCB	National Coordinating Body
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
WI-IP	Wetlands International Indonesia Programme

Daftar Isi

HALAMAN SAMPUL	i
TIM PRODUKSI	ii
PENGANTAR dan UCAPAN TERIMA KASIH	iii
DAFTAR ISTILAH dan SINGKATAN	iv
DAFTAR ISI	v
DOKUMENTASI FOTO	vi
I. SAMBUTAN KETUA NCB	1
II. SEKILAS TENTANG SEMINAR NASIONAL	5
III. MAKALAH	7
IV. DIKSUSI KELOMPOK	120
V. RUMUSAN	135
LAMPIRAN	
Lampiran 1 Jadwal Acara	137
Lampiran 2 Daftar Hadir Peserta Seminar	138
Lampiran 3 Notulensi Seminar Nasional	141



Pembukaan Seminar Nasional oleh Ketua NCB MFF Indonesia



Penutupan Acara Seminar Nasional 10 Oktober 2012 dengan Foto bersama



Peserta Seminar Nasional 10 Oktober 2012



Diskusi dari Hasil Pemaparan dalam Seminar Nasional 10 Oktober 2012

I. Sambutan Ketua NCB Indonesia

Pembukaan.

Kebijakan Nasional Pengelolaan Wilayah Pesisir

Oleh: Dr. Ir. Sri Yanti Wibisana, MS, Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian PPN/Bappenas



KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR

Oleh:
Direktur Kelautan dan Perikanan
Kementerian PPN/Bappenas

Disampaikan dalam
Seminar Nasional Adaptasi Pengelolaan Wilayah Pesisir Berkelanjutan
Semarang, 10 Oktober 2012

1. PENDAHULUAN

Wilayah pantai dan Pesisir merupakan wilayah peralihan (interface) ekosistem darat dan laut → memiliki sifat dan ciri yang unik, serta mengandung produksi biologi cukup besar dan jasa-jasa lainnya.

Potensi kawasan pesisir :

- Sumber daya pesisir (terumbu karang, mangrove dan padang lamun)
- Keragaman flora fauna
- Keindahan alam

Peran:

- Habitat ikan → peningkatan total tangkapan
- Menjaga keanekaragaman hayati laut
- Wisata bahari sebagai sumber alternatif masyarakat sekitar
- Menyediakan jasa lingkungan lainnya

[2]

2. KEBIJAKAN RPIP TERKAIT PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR (UU No 17/2007 tentang RPIP 2005-2025)

Misi 6

- Mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari

Misi 7

- Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional

Upaya :

- ✓ Memperbaiki pengelolaan SDA-LH
- ✓ Meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati

3

3. KEBIJAKAN RPJMN 2010 -2014 TERKAIT PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR

RPJMN (Perpres No. 5 Tahun 2010) BUKU I: PRIORITAS NASIONAL



- Prioritas 5. Ketahanan Pangan
→ Menjamin ketersediaan SDI melalui pemeliharaan kualitas ekosistem pesisir sebagai sumber nutrisi dan habitat ikan



- Prioritas 9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
→ Upaya pengelolaan dan pengembangan konservasi kawasan dan jenis, mitigasi dan adaptasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

BUKU II: PRIORITAS BIDANG

- Bidang SDA dan LH : Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

4

4. REHABILITASI MANGROVE SEBAGAI BENTUK PENGELOLAAN PESISIR TERPADU

- Rehabilitasi wilayah pesisir → *Soft-structure* (mangrove, vegetasi pantai, dsb), *hard-structure* (pemecah ombak, penahan gelombang, dsb), Kombinasi.
- Implementasi penanaman mangrove → "Ayo Tanam Mangrove", Program 1 Milyar pohon, dan *Mangrove for the future*.



Lanjutan...

Keterpaduan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Sebagai Bentuk Pengelolaan Wilayah Pesisir:

1. Keterpaduan Rencana Tata Ruang.
2. Keterpaduan Rencana Pembangunan Wilayah Pantai dan Pesisir.
3. Keterpaduan dalam Pengembangan Kelembagaan (lintas sektor, pusat-daerah, masyarakat)

Lanjutan...

Arahan Perencanaan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Sebagai Bentuk Pengelolaan Wilayah Pesisir:

1. Mengamankan kawasan mangrove yang masih utuh.
2. Merehabilitasi kawasan yang rusak secara terintegrasi.
3. Meningkatkan mutu kawasan mangrove untuk mengoptimalkan fungsi dan manfaat.

5. HARAPAN DALAM SEMINAR INI

"Terbangun kesepahaman bersama mengenai pentingnya peran mangrove dalam upaya rehabilitasi kawasan pesisir sebagai upaya pengelolaan kawasan pesisir secara terpadu dengan menghimpun, mengidentifikasi, dan mengevaluasi informasi penting terkait dengan keadaan kawasan pesisir".



Selamat Berdiskusi

II. Sekilas Tentang Seminar Nasional

a. Tema Seminar Nasional

Seminar Nasional ini dengan mengambil tema adalah Adaptasi Pengelolaan Pesisir Berkelanjutan; Perbaikan dan Rehabilitasi Kerusakan Pesisir Utara Jawa.

b. Latar Belakang

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki laut seluas lebih dari dua-pertiga wilayah Indonesia, dengan panjang pantai Indonesia sebesar 81.000 km dan mempunyai pulau sekitar 17.000 pulau. Dengan kondisi fisik sebagai negara kepulauan, Indonesia rentan terhadap bencana baik bencana akibat dampak perubahan iklim maupun abrasi dan bencana alam laut lainnya. Sedangkan pesisir sendiri memiliki peran yang penting untuk mendukung berbagai kegiatan perekonomian khususnya distribusi sumber daya dan pengembangan pasar sebagai interaksi manusia dan lingkungan. Perkembangan pesisir yang semakin maju juga menuntut peningkatan sarana dan prasarana sebagaimana yang terjadi di Pantai Utara Jawa (Pantura Jawa). Dampak positif pengembangan pesisir dapat mendukung distribusi perekonomian di tingkat lokal dan nasional. Namun apabila pengembangan pesisir tidak direncanakan dengan baik akan mengakibatkan degradasi sumber daya pesisir. Salah satu dampaknya yaitu ancaman abrasi sehingga menurunnya ekosistem dan habitat keanekaragaman hayati.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2010 menunjukkan bahwa hasil identifikasi di Pantura Jawa terjadi kerusakan karena abrasi sebesar 91.652 Ha. Kasus yang terjadi di Desa Tambaksumur dan Tambaksari di Kabupaten Karawang - Jawa Barat menunjukkan terjadinya abrasi yang menyebabkan kerusakan tambak dan 40 keluarga kehilangan rumah. Selain itu, 200 ha lahan telah

terkikis dan 208 keluarga kehilangan rumah mereka karena abrasi di Kecamatan Sayung Demak - Jawa Tengah. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu.

Evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah menunjukkan bahwa untuk mencegah abrasi tidak cukup dengan hanya menanam mangrove di pesisir. Di beberapa wilayah Indonesia yang kondisi mangrovenya sudah rusak diperlukan bantuan penahan gelombang jika akan melakukan rehabilitasi pantai dengan mangrove. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi status kondisi pesisir termasuk kondisi mangrove. Beberapa alternatif telah dilakukan dalam rangka rehabilitasi pesisir pantai. Pertama dilakukan dengan penanaman mangrove. Kedua, jika hal itu tidak berhasil maka sebelum penanaman mangrove diupayakan dengan menggunakan pembuatan penahan gelombang. Ketiga, jika kedua alternatif tidak berhasil maka dibuat alat pemecah ombak (APO) tanpa penanaman mangrove.

Sejalan dengan upaya tersebut di atas, diperlukan upaya pengembangan kelembagaan pengelolaan wilayah pesisir baik di pusat maupun di daerah, yang melibatkan para pemangku kepentingan terkait melalui perencanaan kolaboratif dan komprehensif. Setiap pihak harus memahami tujuan pengelolaan wilayah pesisir terpadu dan mempertimbangkan keberadaan masyarakat setempat yang masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap wilayah pesisir dan laut.

c. Tujuan

Ada lima (5) tujuan Seminar Nasional, yaitu:

1. Mengevaluasi dan memetakan kerusakan pesisir Pantura Jawa
2. Mengidentifikasi penyebab kerusakan di Pantura Jawa
3. Membuat data dasar kegiatan yang sudah dan akan dilakukan oleh K-L terkait untuk penanganan Pantura Jawa
4. Membangun kesepahaman upaya rehabilitasi pesisir Pantura Jawa oleh pemangku kepentingan terkait
5. Mempromosikan peran mangrove untuk rehabilitasi Pantura Jawa

d. Keluaran

Tiga (3) keluaran dari Seminar Nasional ini antara lain:

1. Matriks informasi data dasar status dan penyebab kerusakan Pantura Jawa dan kegiatan yang sudah dilakukan oleh pemangku kepentingan
2. Rekomendasi terhadap upaya rehabilitasi/penanganan kerusakan pesisir Pantura Jawa
3. Laporan hasil seminar nasional

e. Acara

Acara Seminar Nasional ini menggabungkan antara pemaparan pleno dari kementerian terkait dan ulasan permasalahan dari tenaga ahli yang memiliki hasil penelitian mengenai kondisi wilayah pesisir dan kemudian membawa hasil pleno ini kedalam diskusi kelompok. Detail mengenai acara sebagai berikut:

1. Acara pembukaan oleh Bappenas/ ketua NCB Indonesia
2. Pemaparan mengenai Regulasi dan Kebijakan Rehabilitasi Wilayah Pesisir oleh KKP
3. Pemaparan makalah

- Kementerian Kehutanan: Regulasi dan Implementasi Rehabilitasi Hutan Mangrove
 - Kementerian Lingkungan Hidup: Standar Kriteria Kerusakan Pesisir dan Upaya Pelestarian Wilayah Pesisir Pantura Jawa
 - Kementerian Pekerjaan Umum: Implementasi dan Regulasi Mencegah Kerusakan Pantura Jawa
 - Tenaga ahli: Pemetaan Status dan Kerusakan Wilayah Pesisir Pantura Jawa, studi kasus di Jawa Tengah
 - Kementerian Dalam negeri: Peran Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) dalam Mendorong Percepatan Pengelolaan Wilayah Pesisir Berkelanjutan
4. Diskusi Kelompok dan presentasi hasil diskusi
 - Struktur-lunak (Soft-structure) untuk Rehabilitasi Wilayah Pesisir
 - Struktur-fisik (Hard-structure) untuk Rehabilitasi Wilayah Pesisir
 - Regulasi dan Kelembagaan untuk Pengelolaan Rehabilitasi Wilayah Pesisir
 5. Perumusan hasil Seminar Nasional (Rekomendasi)
 6. Penutup

III. Makalah Seminar Nasional

Arahan Seminar Nasional

Regulasi dan Kebijakan Rehabilitasi Kawasan Pesisir

Oleh : Ir. M. Eko Rudianto, M.ITBus, Direktur Pesisir dan Lautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan

REGULASI DAN KEBIJAKAN REHABILITASI KAWASAN PESISIR

M. Eko Rudianto
Direktur Pesisir dan Lautan



Disampaikan pada:

Seminar Nasional "Adaptasi Pengelolaan Wilayah Pesisir Berkelanjutan;
Penanganan Kerusakan Pesisir Pantai Utara Jawa"

Semarang, 10 Oktober 2012



DIREKTORAT PESISIR DAN LAUTAN
DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

1

Berbagai aktivitas di WP3K



DAMPAK NEGATIF PEMBANGUNAN DI WILAYAH PESISIR



❖ **ABRASI/ EROSI** yaitu bergesernya posisi garis pantai ke arah daratan

❖ **PERUBAHAN HIDRO-OSEANOGRAFI**



❖ **AKRESI/SEDIMENTASI** yaitu bergesernya posisi garis pantai ke arah laut/darat

❖ **PENCEMARAN**



❖ **RUSAKNYA EKOSISTEM/ HABITAT**

❖ **TERTUTUPNYA/TERBATASNYA AKSES MASYARAKAT TERUTAMA NELAYAN KECIL MENUJU PANTAI**

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

FAKTOR PENYEBAB KERUSAKAN WILAYAH PESISIR

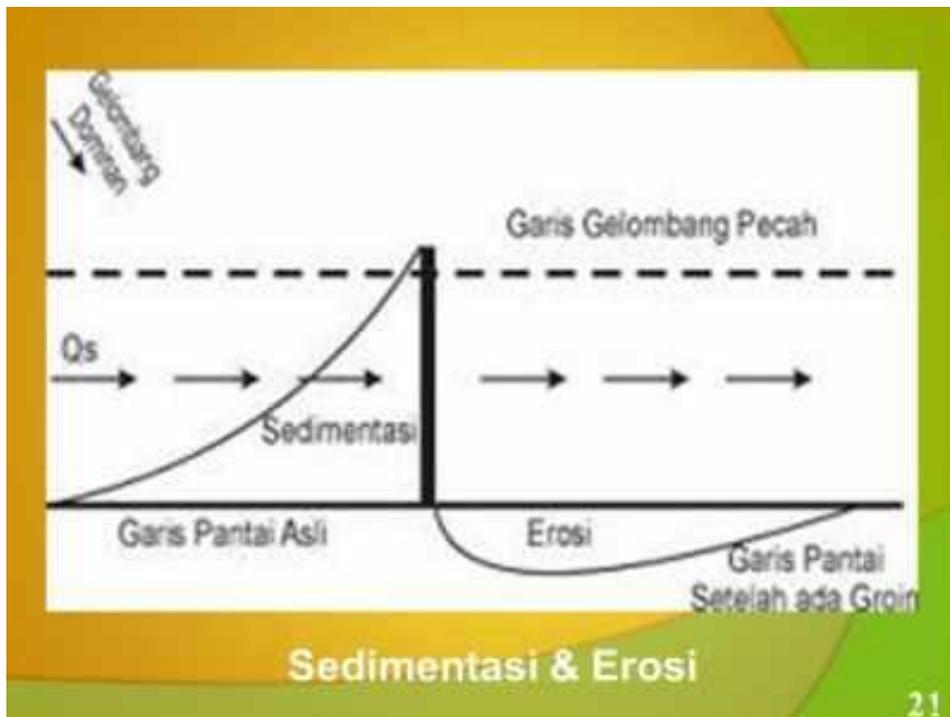
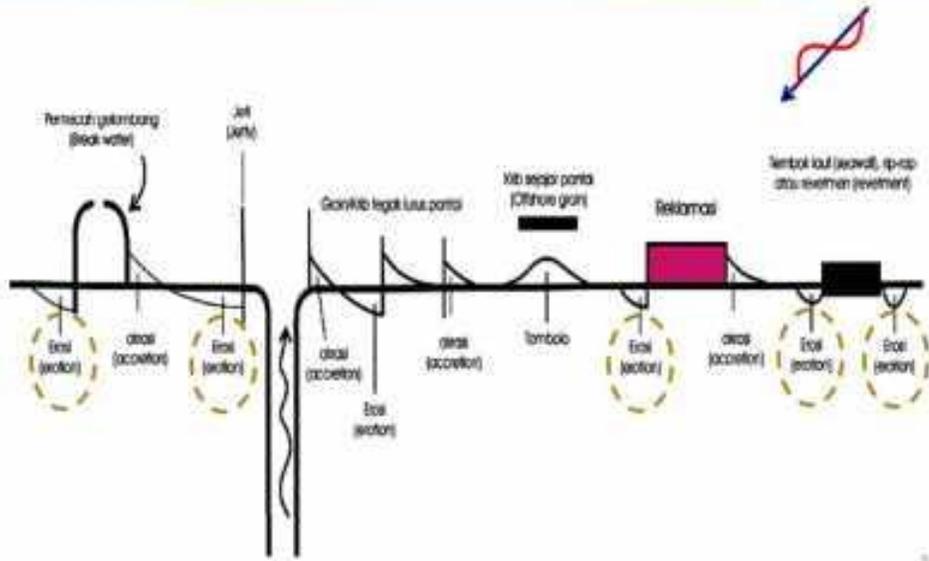
FAKTOR ALAM

- ❑ Arus dan Gelombang pasang
- ❑ Gempa dan Tsunami
- ❑ Angin dan Badai
- ❑ Perubahan Iklim

FAKTOR MANUSIA

- ❑ PENGARUH ADANYA BANGUNAN PANTAI (JETTY, BREAKWATER, GROIN, REKLAMASI)
- ❑ Penambangan material sungai
- ❑ Pemindahan muara sungai
- ❑ Pengaruh penebangan hutan mangrove
- ❑ Pengaruh pembuatan waduk di hulu
- ❑ Penambangan pasir laut

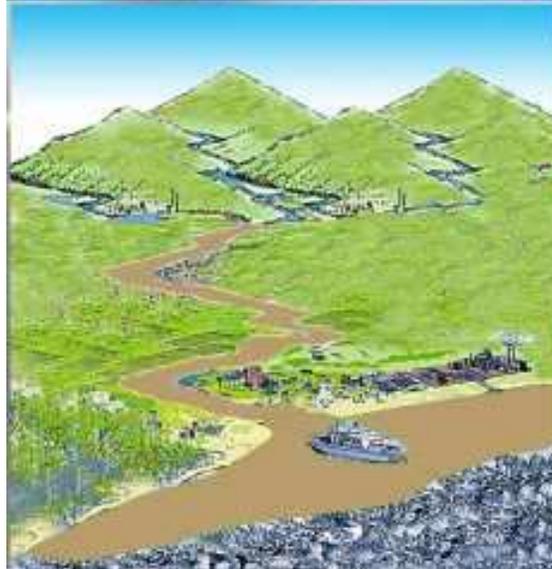
TIPOLOGI BANGUNAN PANTAI DAN DAMPAKNYA TERHADAP GARIS PANTAI



Erosi dan sedimentasi



Pencemaran & Sedimentasi akibat aktivitas di Darat



- **Penghubung antara daratan di hulu dan wilayah pesisir**
- **Penghantar bahan pencemar dari hulu ke pesisir**
- **Dampak yang terjadi di hulu juga dirasakan di pesisir karena peran DAS**

KERUSAKAN DI WILAYAH PESISIR

ABRASI & AKRESI BANTEN

Kecamatan	Abrasi	Akresi	Akresi (reklamasi)	Tetap	Grand Total	Sumber Penyebab	
Pulo Ampel			5.841	12.079	15.920	Perusakan mangrove, pengambilan pasir pantai, kerusakan terumbu karang dan reklamasi pantai.	
Bejenegara			5.427	3.287	8.715		
Kramatwatu	6.083			634	6.716		
Kasemen	2.003	1.316		6.613	9.932		
Pofoang		2.384		3.373	7.257		
Tirtayasa	2.665	11.990		5.168	19.823		
Tarata	1.299	8.101		577	9.976		
Kronjo	319			4.201	4.520		Proses alam, kegiatan pembukaan tambak, penambangan pasir pantai, dan kegiatan reklamasi
Kemuri	2.481	182		127	2.791		
Maak	882	3.095		3.048	7.025		
Sukadiri	2.242			5.870	8.112		
Pakodaji	3.824			2.031	5.856		
Telukwaga	2.465	4.728		3.410	10.603		
Kosambi	2.000	1.444		8.105	11.549		
Grand Total	26.263	33.241	9.268	60.523	129.295		

Sumber: data citra tahun 2000-2009 diolah

Sumber: RKP 2011

Abrasi dan Akresi di Jawa Barat

No	Kabupaten	Luas (ha)		Panjang (m)	
		Abrasi	Akresi	Abrasi	Akresi
1	Bekasi	109,34	252,19	15.502	31.680
2	Karawang	79,94	363,42	24.870	64.253
3	Subang	141,91	504,82	22.783	40.872
4	Indramayu	478,34	627,59	72.191	57.131
5	Kab Cirebon	378,93	231,07	46.092	28.695
6	Kota Cirebon	5,10	22,64	4.586	5.225

Sumber : KKP, 2011

LUAS KERUSAKAN PANTAI DI PANTURA JAWA TENGAH (ha)

No	Kabupaten/Kota	Erosi / Abrasi	Akresi / Sedimentasi
1	Rembang	852,86	206,86
2	Pati	514,99	1.458,26
3	Jepara	938,73	445,78
4	Demak	1.016,22	1.646,76
5	Kota Semarang	342,67	318,74
6	Kendal	317,44	1.005,85
7	Batang	101,73	442,02
8	Kota Pekalongan	0,24	350,69
9	Pekalongan	77,06	76,89
10	Pemalang	231,04	2.229,61
11	Tegal	33,64	1.224,04
12	Kota Tegal	24,98	274,39
13	Brebes	2.115,39	2.905,29
	Jumlah	6.566,97	12.585,19

Sumber : KKP, 2011

ABRASI & AKRESI JATIM

No	Kabupaten	Jenis Kerusakan	Kecamatan	Desa	Luas (hitungannya spasial)	Kondisi (hasil survey)
1	Kab. Tuban	Abrasi Laut/Sedimentasi	Tambakboyo	Gadun Tambakboyo Pobasan	300 mAbrasi 200 m 100 m	
				Bancar	Bancar Sicakle Bogorejo Bancung	
			Patang	Kalampayan	500 mAbrasi 100 mSedimentasi S. Luhapang	
			Jenu	Desa Kakurty Mentulu Sugawati Sugawati Jenu	200 m 2000 m 200 m 100 m	
2	Kab. Lamongan	Magrove	Paciran	Sekeloa Kandang Semarang Tunggul	1,25 ha 1 ha	Sedang Sedang
				Brengsing	Labuhan Sedau Lawas Lohpang	1 ha 1,25 ha 20 ha 0,75 ha
		Abrasi Laut	Brengsing	Labuhan Sedau Lawas Lohpang	20 ha 1 ha 0,3 ha	Berat Sedang Sedang

Lanjutan...

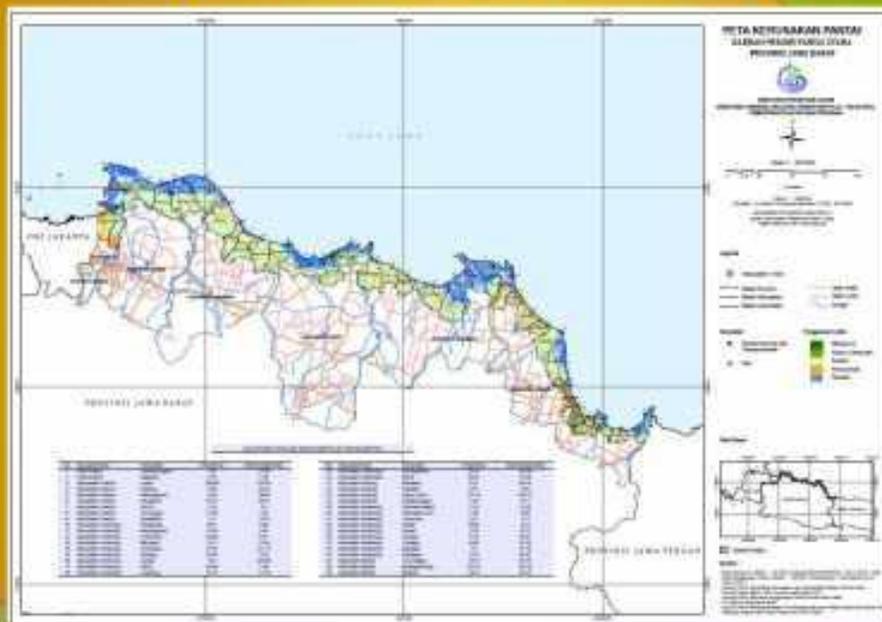
No	Kabupaten	Jenis Kerusakan	Kecamatan	Desa	Luas (hitungannya spasial)	Kondisi (hasil survey)		
3	Kab. Gresik	Magrove	Upang Pengkub	Beran Upang Pengkub Kutan Pengkub Witan Tanjung Widan	4 ha 1,5 ha 10 ha 2 ha	Sedang Berat Sedang Sedang		
				Bangul	Krasat Mawarjo	1,5 ha 0,75 ha	Sedang Sedang	
			Kuta Sebatara	ROB Air Laut	Kendangsari	Kakulak	± 100 m ²	Sedang
					Pakel	Bimoro Samberejo Pakel Tandukduren	± 100 m ²	Berat
7	Kab. Sidoarjo	Sedimentasi	Pekah	Kedung Cerek	± 100 m ²	Sedang		
			Niris	Klipang Kedunggundut	1,5 ha	Daerah Kiri Porong		
4	Kab. Ponorogo	Magrove	Sedimentasi	Sidoarjo Sedati	Kedungrejo 1 ha			
				Magrove	Gadugrejo	45 ha	Berat	
		Magrove	Purwasari	Tambora	50 ha 50 ha	Berat		
				BegukGidul	Kepul Blambangon Mantaborejo Punggugrejo	20 ha 25 ha 40 ha 50 ha	Berat	
7	Kab. Ponorogo	Magrove	Kojono	Jambangan	1,5 ha	Sedang		
			Krasan	Kalirejo	1,5 ha	Berat		
			Lakoh	Tandukduren	0,25 ha	Sedang		
		Abrasi Laut	Lakoh	Kapasari Jatirojo	1000 m ² 150 m ²	Berat		

Sumber : KKP, 2011

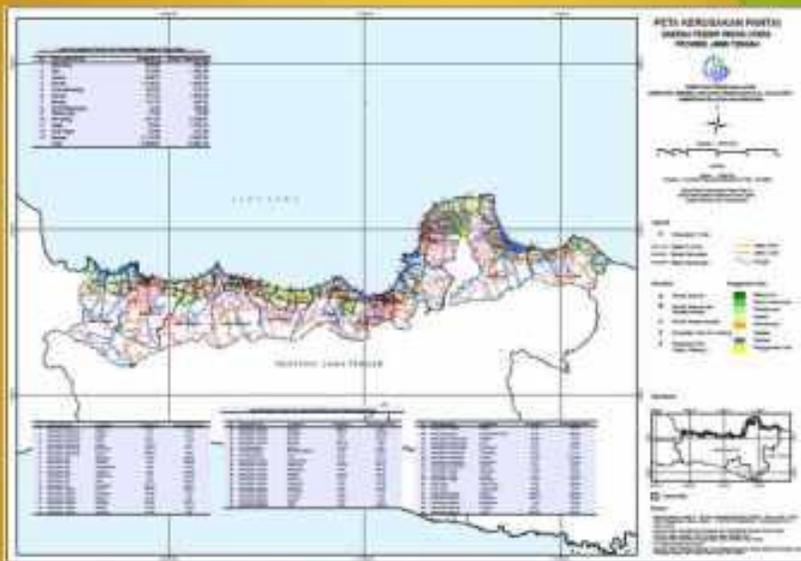
PETA KERUSAKAN PANTAI PROVINSI BANTEN



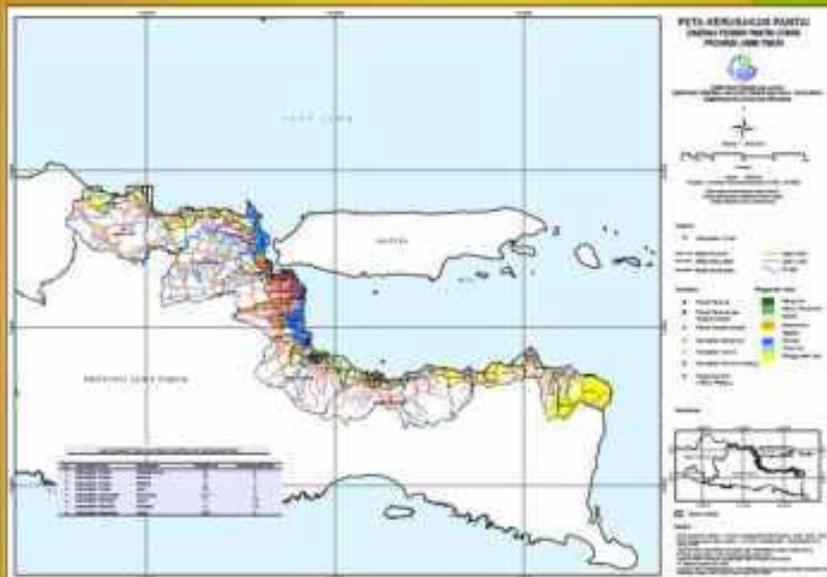
PETA KERUSAKAN PANTAI PROVINSI JAWA BARU



PETA KERUSAKAN PESISIR PANTURA JAWA TENGAH



PETA KERUSAKAN PESISIR PANTURA JAWA TIMUR



KERUSAKAN DI WILAYAH PESISIR

Kerusakan pantai akibat erosi di Indonesia tercatat di 20 provinsi

Kerusakan terjadi di 166 titik,

Total panjang 490 km

Erosi pantai mengancam permukiman, daerah wisata, infrastruktur kelautan dan perikanan, tambak/sawah, dan jalan raya.

(Sumber : KKP, 2003)

KONDISI ABRASI/EROSI DI SEKITAR KAYU LAPIS INDONESIA



Lokasi Tambak Lorok, Kota Semarang dan Morosari, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah



KARAWANG



Erosi pantai di Kab. Karawang yang telah menyebabkan kehilangan lahan lebih dari 200 ha

Abrasi



Photo D33 -- eroded *Rhizophora*

21

JABAR			LUAS MANGROVE			JATIM		
NO	KABUPATEN	LUAS MANGROVE (Ha)	NO	KABUPATEN	LUAS MANGROVE (Ha)			
1	Bekasi	1.209.088	1	Bangkalan	863.107			
2	Ciamis	426.462	2	Banyuwangi	2741.884			
3	Cianjur	89.157	3	Gresik	615.005			
4	Cirebon	237.758	4	Kota Probolinggo	397.927			
5	Garut	61.920	5	Kota Surabaya	10.365			
6	Indramayu	1533.219	6	Lamongan	60.268			
7	Karawang	316.220	7	Sumajang	764.951			
8	Kota Cirebon	15.468	8	Pamekasan	382.866			
9	Sukang	1845.608	9	Pasuruan	111.992			
10	Sukahumi	62.300	10	Probolinggo	469.392			
11	Tasikmalaya	133.751	11	Sampang	538.467			
BANTEN			12	Sidoarjo	173.781			
NO	KABUPATEN	LUAS MANGROVE (Ha)	13	Situbondo	406.727			
1	Kota Cilegon	323.219	14	Sumenep	10711.889			
2	Kota Serang	25.503						
3	Lebak	19.670						
4	Pandeglang	1813.623						
5	Serang	277.543						
6	Tangerang	456.63						

Sumber: Hakesurtana, 2010

PEMANFAATAN BERKELANJUTAN



Penataan Ruang yang memperhatikan kelestarian pemanfaatan wilayah secara efektif, adil dan transparan



Pulau-pulau kecil yang produktif dan menjadi perisai ketahanan negara



Konservasi yang efektif dan mendorong pemanfaatan sumberdaya pesisir dan kelautan secara berkelanjutan dan optimal



Pengelolaan pesisir yang mampu mengantisipasi tekanan alam maupun manusia secara efektif



Pemberdayaan Masyarakat yang mendorong kemandirian dan peningkatan produktivitas

www.kemari.go.id | @kemari.go.id | 021-5200-1000

Untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil, pembangunan bangunan pantai **WAJIB MENGURANGI DAMPAK:**

- ❖ perubahan hidro-oceanografi yang meliputi arus, gelombang, dan kualitas sedimen dasar laut;
- ❖ perubahan sistem aliran air dan drainase;
- ❖ peningkatan volume/frekuensi banjir dan/atau genangan;
- ❖ perubahan batimetri;
- ❖ perubahan morfologi dan tipologi pantai;
- ❖ penurunan kualitas air dan pencemaran lingkungan hidup;
- ❖ degradasi ekosistem pesisir.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

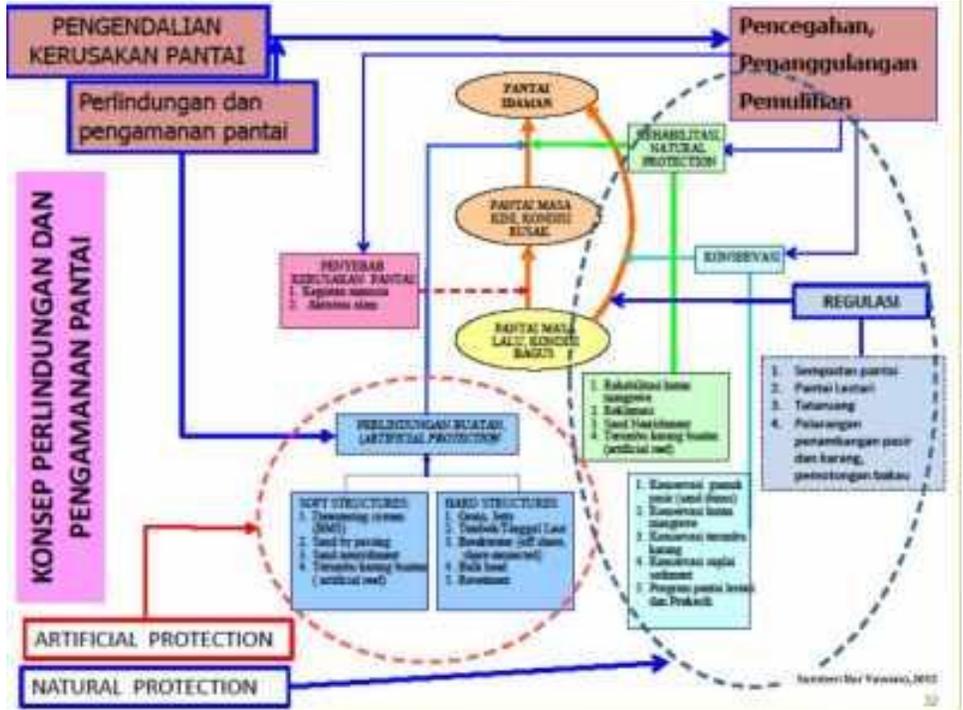
REHABILITASI dalam UU No 27 tahun 2007

- Merupakan proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya berbeda dari kondisi semula
- wajib dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem dan/atau keanekaragaman hayati setempat
- Dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah dan Orang yang memperoleh manfaat dari pesisir.

URGENSI REHABILITASI

1. Menjaga eksistensi sumber daya
2. Mengembalikan fungsi ekosistem yang rusak
3. Melindungi kelestarian alam
4. Menjaga keberlanjutan pemanfaatan sumber daya untuk kehidupan manusia
5. Meningkatkan natural resilience terhadap bencana dan sekaligus menjaga fungsi perlindungan dan pemulihan dari bencana





**BEBERAPA KEG.
REHABILITASI FISIK
YANG PERNAH
DILAKUKAN KKP**

Bertungsi
untuk
menangkap
sediment



PEMBANGUNAN ALAT PEMECAH
OMBAK (APO) DI KEL.
WANGUNHARJO SEMARANG
TAHUN 2011



PEMBUATAN ALAT PEMECAH OMBAK (APO) DI KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2011



LANJUTAN PEMBANGUNAN ALAT PEMECAH OMBAK (APO) DI
SEMARANG TAHUN 2012



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

**UPAYA MENGATASI KERUSAKAN PANTAI
MELALUI REHABILITASI MANGROVE**



PERAN K/L DALAM MENGATASI KERUSAKAN PANTURA JAWA

Permasalahan	Upaya Penanganan	KLH	KKP	Kemhut	Kemendagri	PU	Instansi lainnya
Tata Ruang	Perda Zonasi/ RTRW	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Abrasi/Sedimentasi	Mangrove/ Vegetasi Pantai	✓	✓	✓	✓		✓
	Struktur Pelindung Pantai					✓	✓
	Penyadaran Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Robi/Banjir	Mangrove/ Vegetasi Pantai	✓	✓	✓	✓		✓
	Struktur Pelindung Pantai					✓	✓
	Penyadaran Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kerusakan IDA (Mangrove, TK, Lamun)	Rehabilitasi	✓	✓	✓	✓		✓

Ke depan diharapkan ada langkah-langkah untuk :

- ❖ Koordinasi lintas sektor dalam penanganan kerusakan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
- ❖ Penetapan lokasi prioritas penanganan kerusakan.
- ❖ Implementasi SNPEM
- ❖ Peningkatan anggaran untuk penanganan kerusakan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
- ❖ Pengembangan kebijakan untuk peningkatan pencegahan kerusakan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.



Makalah 1.

Regulasi dan Implementasi Rehabilitasi Hutan Mangrove

Oleh : Ir. Bedjo Santoso, MSc, Direktur Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kementerian Kehutanan



**REGULASI DAN IMPELEMENTASI
PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE
DI INDONESIA**

**BANYAK
LAHAN
KEJEN**

**GERAKAN PENANJARAN
1 MILYAR POHON**

**DIREKTUR BINA REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA PENGELOLAAN DAS DAN PS
KEMENTERIAN KEHUTANAN
Semarang, 10 Oktober 2012**

1

PENDAHULUAN

POTENSI MANGROVE INDONESIA

Dunia	16.530 juta Ha (FAO, 1994)
	15.24 juta Ha (Mark Spalding, 2010)
Asia	7.441 juta Ha
Afrika	3.258 juta Ha
Amerika	5.831 juta Ha
Asia Tenggara	5.65 juta Ha (FAO, 1994)
	5.11 juta Ha (Mark Spalding, 2010)
Indonesia	3.10 juta Ha (FAO, 1994)
	3.19 juta Ha (Mark Spalding, 2010)
	3.24 juta Ha (Bakosurtanal, 2009)

Inventarisasi hutan pantai di Indonesia (Mansueti, 2010) : 700.000 ha lebih



2

PERKEMBANGAN KONDISI MANGROVE INDONESIA



- Potensi (habitat alami) hutan mangrove Indonesia tahun 1999 seluas : 9.383.657,59 ha

Kondisi Baik : 2.548.200,42 Ha (27,2%)

- Dalam Kawasan : 1.884.353,27 Ha (28,1%)

- Luar Kawasan : 663.846,15 Ha (7%)

Kondisi Sedang : 4.510.456,61 ha (48,2%)

- Dalam Kawasan : 1.213.452,77 Ha (13%)

- Luar Kawasan : 3.297.003,84 Ha (35,2%)

Kondisi Rusak : 2.348.174,29 ha (22,9%)

- Dalam Kawasan : 603.848,63 Ha (6,5%)

- Luar Kawasan : 1.542.325,66 Ha (16,5%)

- **Kondisi mangrove dan Pantal (existing) tahun 2010**
Mangrove : 3.741.533,352 ha
Pantal : 701.588 ha

- **Kondisi mangrove (existing) tahun 2008** seluas : 7.768.410,685 ha

Kondisi Baik : seluas : 2.380.705,979 ha (30,7%)

Kondisi Sedang seluas : 2.127.340,085 ha (27,4%)

Kondisi Rusak : seluas : 3.250.363,631 ha (41,9%)

3

POTENSI MANGROVE INDONESIA 2010

Unit Kerja	Dalam Kws (Ha)	Luar Kws (Ha)	Jumlah (Ha)
BPHM I	1.084.502,273	373.735,21	3.741.533,352
BPHM II	187.022,199	2.096.273,22	2.283.295,419
Total Indonesia	1.271.524,922	2.470.008,43	3.741.533,352

Sumber : RTK RHL DAS MSP 2010

4

Penyebab rusaknya ekosistem mangrove yaitu:

- konversi ke pemanfaatan lain seperti perumahan, budidaya perairan, penebangan tidak terkendali, pembangunan infrastruktur pantai/pelabuhan, industri, perkebunan,
- bencana alam (abral, tsunami, dll)

Kerusakan ekosistem mangrove sebagian besar di 70% terjadi di luar kawasan hutan



5

REGULASI PENGELOLAAN MANGROVE

6

1. Peraturan berkaitan dengan pengelolaan mangrove

- Keppres No. 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
 - ekosistem mangrove merupakan Kawasan Lindung
 - pasal 14 : kriteria sempadan pantai
 - pasal 27 : kriteria kawasan pantai berhutan bakau
- PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- Kewenangan Kementerian Kehutanan :
 - Menyusun Rencana Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) termasuk mangrove
 - Melaksanakan RHL, pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan hasil rehabilitasi termasuk mangrove pada hutan konservasi kecuali Cagar Alam dan Zona Inti Taman Nasional
- PP No. 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.
 - RHM didahului dengan penyusunan RTk RHL-DAS, RPRHL, RTnRHL



7

2. Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove (RPerPres SNPEM)

- > Sasaran : terlaksananya koordinasi lintas sektor di tingkat Pusat dan Daerah dalam pengelolaan mangrove
- > Diterbitkan oleh Dephut pada tahun 1997
- > Revisi Strategi Nasional, tahun 2003 (melibatkan para pihak, khususnya: DKP, Depdagri, Meneg LH, LIPI dan LSM)
- > Proses Legalisasi berupa Peraturan Presiden
- > Agustus 2012 PerPres SNPEM telah disahkan oleh Presiden



8

3. Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Hutan Mangrove

a. Balai Pengelolaan Hutan Mangrove (Permenhut No. P.04/Menhut-II/2007 tanggal 6 Februari 2007)

- BPHM Wilayah I di Denpasar (Jawa, Bali, Madura, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua)
- BPHM Wilayah II di Medan (Sumatera dan Kalimantan)

b. Kelompok Kerja Mangrove Nasional (KKMN)

Kelompok Kerja Mangrove Nasional (KKMN) merupakan tim kerja lintas sektor/instansi/lembaga swadaya masyarakat pemerhati mangrove yang dibentuk sebagai jembatan penghubung sebelum pembentukan Tim Kerja Koordinasi (Tim Koordinasi Nasional) yang diamanatkan dalam Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove resmi ditetapkan

c. Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD)

Saat ini sudah terbentuk 23 KKMD Provinsi dan 3 KKMD Kabupaten.



9

4. Penyusunan Pedoman, Kriteria, Standar dan Prosedur Pengelolaan Hutan Mangrove

a. Penyusunan Pedoman Teknis RHL, meliputi :

- Perencanaan RHL
- Reboisasi
- Rehabilitasi Hutan Mangrove
- Penghijauan

b. Penyusunan Kriteria dan Indikator serta Prosedur Penilaian Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan Mangrove (Mengacu Pola Umum, Standar serta Kriteria Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Keputusan Menhut No. 20/Kpts-II/2001 tanggal 31 Januari 2001)

Tujuan : untuk menetapkan rambu-rambu dasar penilaian keberhasilan penyelenggaraan rehabilitasi hutan mangrove

Kriteria dan indikator dimaksud telah direview .

10

IMPLEMENTASI

11

1. Penyediaan Data dan Informasi

Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi
Hutan Mangrove oleh BPDAS seluruh Indonesia
(tahun 2006-2007)



Kompilasi data dan informasi ke dalam database
hutan mangrove oleh Ditjen BPDAS PS (Tahun 2010)
(Pengembangan Sistem Informasi Mangrove)

12

2. Perencanaan

Rencana Teknis (RTk) RHL (mangrove)
(rencana pemulihan hutan dan lahan serta penguatan kelembagaan)



Rencana Pengelolaan (RP) RHL (Mangrove)
(kebijakan dan strategi, tentative lokasi,
jenis kegiatan, kelembagaan, pembiayaan, dan tata waktu
Dalam 5 tahun)



Rencana Tahunan (RTn) RHL (Mangrove)
rancangan kegiatan RHL,
detil lokasi dan volume kegiatan fisik, kebutuhan biaya, tata waktu,
penguatan kelembagaan, pembinaan, pelatihan, pendampingan, penyuluhan,
pemantauan, dan evaluasi

13

3. Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove



Rehabilitasi Hutan Mangrove di 100
Kabupaten
Mulai Tahun Anggaran 2008 dengan
anggaran Total Sebesar Rp 100 Milyar

Rehabilitasi Hutan Mangrove :

- Tahun Anggaran 2004 : 4.794 Ha
- Tahun Anggaran 2005 : 27.876 Ha
- Tahun Anggaran 2006 : 1.270 Ha
- Tahun Anggaran 2007 : 1.669 Ha
- Tahun 2008 (kelanjutan TA 2007) : 1.930 Ha

Program RHL Mangrove

- Tahun 2010 sd 2014 : 10.000 Ha/Tahun antara lain melalui KBR Mangrove

14

RHL Mangrove (dan pantai) seluas 30.000 ha

RHL MP : 10.000 ha/Th

No	Provinsi	KEBUN BIBIT MANGROVE/PAKAYAN/BAWA MANGROVE (BA)				KETERANGAN	
		2011	2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8
	UNAD Sumatera	756,2	500,0	600,0	600,0	600,0	11,7,30
	UNYU Jawa	1.204,8	600,0	700,0	700,0	600,0	11,7,30
	MAN Jawa	6.645,9	600,0	600,0	700,0	700,0	11,7,30
	ANP Jawa Sumatera	148,7	400,0	500,0	500,0	500,0	11,7,30
	UNYU Jawa	148,7	200,0	200,0	200,0	200,0	11,7
	UNYU Jawa	148,7	400,0	400,0	400,0	400,0	11,7,30
	UNYU Jawa	644,5	400,0	400,0	400,0	400,0	11,7,30
	UNYU Jawa	805,3	170,0	170,0	170,0	170,0	11,7,3,0
	UNYU Jawa	1.811,4	100,0	140,0	140,0	140,0	11,3,0
	UNYU Jawa	1.886,2	400,0	400,0	400,0	400,0	11,7,3,0
	UNYU Jawa	151,1	30,0	40,0	30,0	30,0	11,7
	UNYU Jawa	64,9	7,0	7,0	7,0	7,0	11
	UNYU Jawa	818,7	100,0	100,0	100,0	100,0	11,7
	UNYU Jawa	124,1	100,0	600,0	600,0	600,0	11,7
	INDY		600,0	100,0	100,0	100,0	11
	UNYU Jawa Kalimantan	495,7	600,0	700,0	700,0	600,0	11,7
	UNYU Jawa Kalimantan	1.707,8	640,0	600,0	700,0	600,0	11,7,30
	UNYU Jawa	3.407,9	640,0	1.300,0	1.300,0	1.300,0	11,7,30

UNYU Jawa	1.119,2	400,0	400,0	700,0	600,0	11,7,3,0
UNYU Jawa	1.707,8	280,0	300,0	300,0	300,0	11,7,3,0
UNYU Jawa	95,1	400,0	400,0	400,0	400,0	11
UNYU Jawa	204,4	140,0	140,0	140,0	140,0	11,7,3,0
UNYU Jawa	1.119,2	280,0	140,0	140,0	200,0	11,7,3,0
UNYU Jawa	94,3	140,0	200,0	200,0	200,0	11,7,3,0
UNYU Jawa	204,4	140,0	140,0	140,0	200,0	11,7,3,0
UNYU Jawa	272,9	400,0	200,0	140,0	200,0	11,7,3,0
UNYU Jawa	400,0	110,000,0	700	100,0	11,7,3,0	
UNYU Jawa	714,8	170,0	400,0	300,0	200,0	11,7,3,0
UNYU Jawa	1.119,2	280,0	140,0	120,0	100,0	11,7,3,0
UNYU Jawa	204,4	140,0	140,0	120,0	100,0	11,7,3,0
UNYU Jawa	400,0	100,0	100,0	80,0	100,0	11,7,3,0
UNYU Jawa	412,8	600,0	400,0	300,0	400,0	11,7,3,0
UNYU Jawa	2.400,0	700,0	400,0	800,0	600,0	11,7,3,0
Jumlah Indonesia	35.900	10.000	10.000	10.000	10.000	11,7,3,0

15

KBR Mangrove (2012):

Tahun 2012 Kegiatan RHL mangrove dan sempadan pantai berasal dari Kebun Bibit Rakyat (KBR) dari 10.000 unit KBR, 400 unit disiapkan untuk mangrove dan pantai



16

4. Kerjasama Luar Negeri / Lembaga Donor Internasional

- ADB : Proyek Pengelolaan Mangrove di Sulawesi (tahun 1997)
- ITTO : Proposal Pengelolaan Hutan Mangrove di Sumatera Utara (tahun 2005)
- JICA : *Sub Sectoral Program in Mangrove* (tahun 2007 – 2010)
MECS 2011 - 2014
- KOICA : Rehabilitasi Hutan Mangrove Pasca Tsunami di NAD (Maret 2006 – Oktober 2008)
- JAFTA dan JWRC : the Study Project on Forest Management for Mitigation of Natural Disaster (2008-2009)
- UNDP - IUCN : Program Mangrove For the Future (MFF), mangrove sebagai infrastruktur
- YAMAMOTO : Rehabilitasi mangrove di Prop. KEPRI seluas 500 Ha, Prop. JAMBI 20.000 Ha, Prop. SUMSEL 20.000 Ha, Prop. BABEL 10.000 Ha

17

5. Partisipasi Masyarakat dalam rangka OBIT

- KMDM
- GPTP
- Penghijauan Lingkungan
- CSR



18



PERMASALAHAN YG DIHADAPI :

- MASIH TERSEDYANYA DATA DAN INFORMASI YANG AKURAT (PETA SISTEM LAHAN SKALA 1 : 250.000, PETA KEKRITISAN LAHAN SKALA 1 : 100.000) SERTA PETA POTENSI HUTAN MANGROVE SKALA 1 : 50.000)
- MASIH TINGGNYA TERAWAN AKAN HUTAN MANGROVE SHG LAJU KERUSAKAN MANGROVE TERUS TERJADI
- MASIH RENDAHNYA KUALITAS SDM DALAM PENGELOLAAN MANGROVE (PEMAHAMAN, KETRAMPILAN)
- TEBENTASNYA RHL MANGROVE (RENDAHNYA KEBERHASILAN REHABILITASI MANGROVE, TDK JELASNYA PENGELOLAAN PASCA RHL.)

21

UPAYA TINDAK LANJUT:

- KERJASAMA DENGAN BERBAGAI PIHAK DALAM PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI MANGROVE
- MENINGKATKAN UPAYA UPAYA PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN MANGROVE (RKMD, FASILITASI, SOSIALISASI)
- SIBERKEBERJALAN DAN PROGRAM DALAM PENGELOLAAN MANGROVE
- MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM UPAYA RHL MANGROVE (PEMANFAWTAN CSR, PEMBENTUKAN KELOMPOK PENGELOLA MANGROVE)
- PENETAPAN ZONASI /TAJIRUANG DAERAH PANTAI YANG DISEPAKATI /DIACU BERBAGAI PIHAK
- PEMANFAWTAN TEKNOLOGI

22



Makalah 2.

Regulasi dan Implementasi Rehabilitasi Hutan Mangrove

Oleh : Ir. Nursiwan Taqim, MSc, Asisten Deputi Urusan Pengendalian Kerusakan Pesisir dan Laut,
Kementerian Lingkungan Hidup

PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN PESISIR DAN LAUT MELALUI PENAATAN KRITERIA KERUSAKAN EKOSISTEM PESISIR DAN LAUT

Asisten Deputi Pengendalian Kerusakan Lingkungan
Pesisir dan Laut
Kementerian Lingkungan Hidup RI

Semarang, 10 Oktober 2012

Page-1

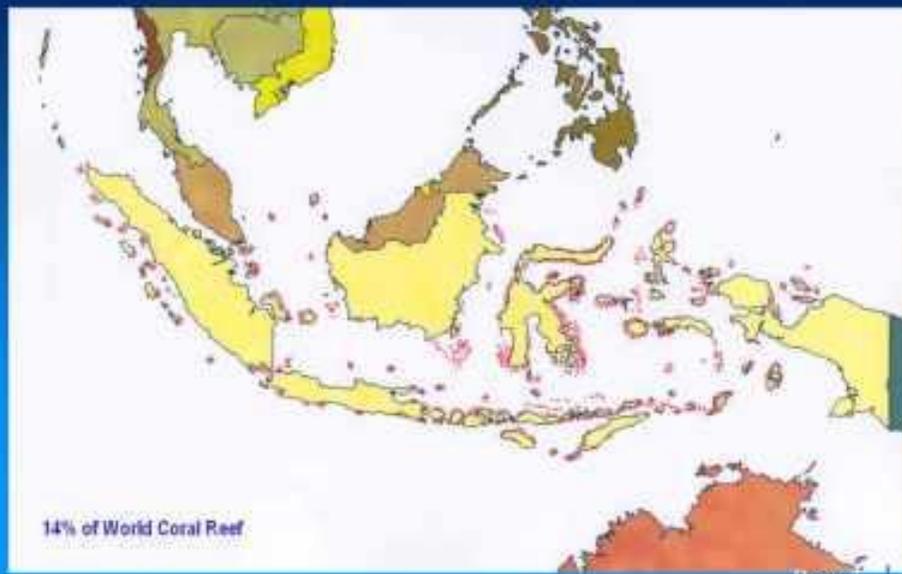
EKOSISTEM UTAMA PESISIR DAN LAUT



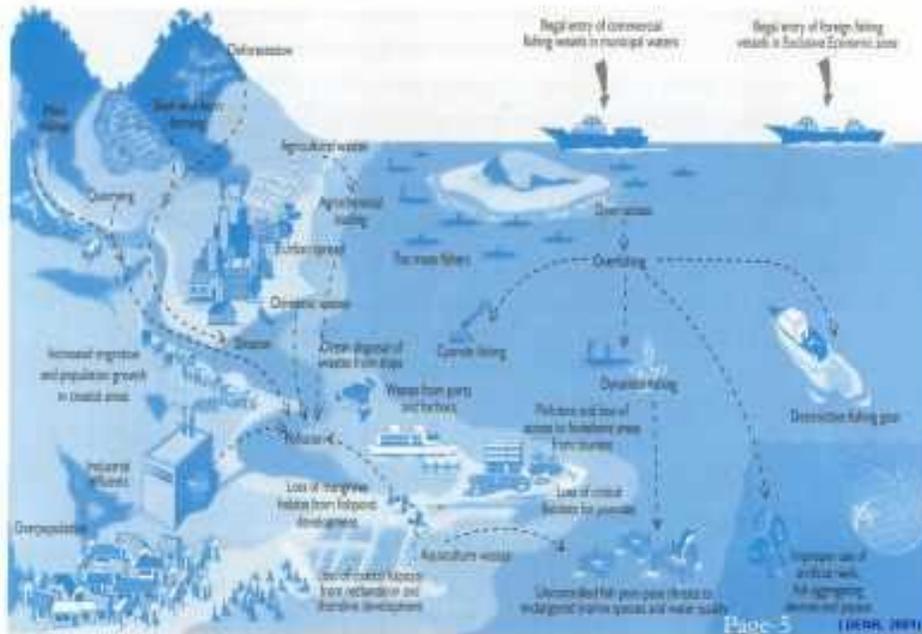
PKSPL (2007)

Page-2

CORAL REEF DISTRIBUTION IN INDONESIA



Isu & Permasalahan Wilayah Pesisir



PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN PESISIR DAN LAUT

- PENCEGAHAN
- PENANGGULANGAN
- PEMULIHAN

PERLINDUNGAN MUTU LAUT (KRITERIA LINGKUNGAN)

- > **KEPMEN LH NOMOR : 04 TAHUN 2001**
TENTANG KRITERIA BAKU KERUSAKAN TERUMBU KARANG
- > **KEPDAL NOMOR: 47 TAHUN 2001**
TENTANG : PEDOMAN PENGUKURAN KONDISI TERUMBU KARANG
- > **KEPMEN LH NOMOR: 51 TAHUN 2004**
TENTANG BAKU MUTU AIR LAUT (Perairan Pelabuhan, Wisata Bahari dan Biota Laut)
- > **KEPMEN LH NOMOR : 200 TAHUN 2004**
TENTANG KRITERIA BAKU KERUSAKAN DAN PEDOMAN PENENTUAN STATUS PADANG LAMUN
- > **KEPMEN LH NOMOR : 201 TAHUN 2004**
TENTANG KRITERIA BAKU DAN PEDOMAN PENENTUAN KERUSAKAN MANGROVE

KRITERIA KERUSAKAN EKOSISTEM PESISIR-LAUT

1. KRITERIA BAKU KERUSAKAN PADANG LAMUN

Tingkat kerusakan	Luas area kerusakan (%)
Tinggi	≥ 50
Sedang	30 - 49.9
Rendah	≤ 29.9

KRITERIA KERUSAKAN EKOSISTEM PESISIR-LAUT

2. KRITERIA BAKU KERUSAKAN TERUMBU KARANG

Parameter	Kriteria baku kerusakan terumbu karang (%)			Keterangan
	Rusak	Buruk	0 - 24.9	
Persentase luas tutupan terumbu karang yang hidup		Sedang	25 - 49.9	Status mutunya berada pada tingkatan rusak
	Baik	Baik	50 - 74.9	
		Baik sekali	75 - 100	

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LH NOMOR : 04 TAHUN 2001

Page-9

KRITERIA KERUSAKAN EKOSISTEM PESISIR-LAUT

3. KRITERIA BAKU KERUSAKAN MANGROVE

Kriteria		Penutupan (%)	Kerapatan (pohon / hektar)	Keterangan
Rusak:	Jarang	< 50	< 1 000	Status mutunya berada pada tingkatan rusak
Baik:	Sedang	≥ 50 - < 75	≥ 1 000 - < 1 500	Status mutunya pada tingkatan baik
	Sangat padat	≥ 75	≥ 1 500	

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LH NOMOR : 201 TAHUN 2004

Page-10

Pengaturan perlindungan terhadap sempadan pantai (KepPres 32/1990, ttg Pengelolaan Kawasan Lindung):

- Psl 13: Perlindungan terhadap sempada pantai dilakukan untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai.
- Psl 14: Kriteria sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai **minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.**
- Psl 26: Perlindungan terhadap kawasan pantai berhutan bakau dilakukan untuk melestarikan hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau dan tempat berkembangbiaknya berbagai biota laut disamping sebagai pelindung pantai dan pengikisan air laut serta pelindung usaha budidaya di belakangnya.
- Psl 27: Kriteria kawasan pantai berhutan bakau adalah **minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis surut terendah ke arah darat.**

Page-11

PENYUSUNAN KRITERIA LINGKUNGAN PESISIR-LAUT

- KRITERIA LOKASI YANG HARUS DILINDUNGI DARI KEGIATAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR KE LAUT
- KRITERIA LINGKUNGAN UNTUK BERBAGAI PEMANFAATAN KAWASAN PESISIR DAN LAUT

Page-12

Lokasi yang perlu dilindungi dari pencemaran/kerusakan pesisir-laut

- Kawasan suaka alam laut
- Kawasan konservasi laut
- Taman Nasional Laut
- Taman Wisata Alam
- Sempadan Pantai (Keptes 32/90)
- Kawasan Terumbu Karang
- Kawasan Mangrove
- Kawasan Padang lamun
- Kawasan up-welling
- Kawasan budidaya perikanan
- Kawasan pembuangan garam rakyat
- Kawasan pemijahan dan pembiakan

Page-13

KEGIATAN AKSI PEMULIHAN EKOSISTEM PESISIR-LAUT

- MENGEMBANGKAN MODEL PEMULIHAN EKOSISTEM PESISIR DAN LAUT SECARA BERTAHAP MELALUI REHABILITASI PANTAI ENTASKAN MASYARAKAT SETEMPAT
(RANTAI EMAS):
 - MENINGKATKAN VEGETASI DI PESISIR (PEMILIHAN JENIS TANAMAN & TEKNOLOGI YANG TEPAT)
 - MENGURANGI ABRASI
 - MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT
 - MEMPERHATIKAN KEARIFAN LOKAL
 - MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT

Page-14

TINDAK-LANJUT PENYUSUNAN PERATURAN PELAKSANAAN UU NO. 32/2009 (DALAM PROSES)

- Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri LH tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove
- Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri LH tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Padang Lamun
- Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri LH tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang

Page-15



Page-16

Makalah 3.

Implementasi Kebijakan Pengamanan Pantai Utara Jawa

Oleh : Mochamad Mazid, ST,SP. Kasubdit Wilayah II Direktorat Sungai dan Pantai, Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
DIREKTORAT SUNGAI DAN PANTAI

IMPLEMENTASI DAN KEBIJAKAN PENGAMANAN PANTAI UTARA JAWA

Semarang, 10 Oktober 2012

Disampaikan oleh :

MOCHAMAD MAZID, ST,SP

(Kasubdit Wilayah II Direktorat Sungai dan Pantai, Ditjen.
Sumber Daya Air, Kementerian PU)



PERMASALAHAN PEMBANGUNAN BIDANG PENGAMANAN PANTAI

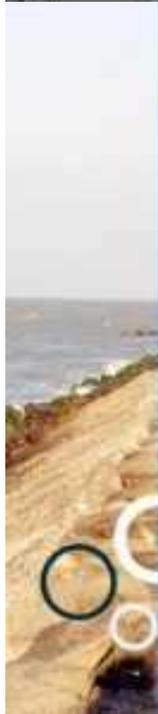
1. Indonesia terdiri dari 17.508 pulau dengan panjang garis pantai \approx 95.000 km (Subandono dkk, 2009).
2. 20% garis pantai di Indonesia mengalami kerusakan pantai. Contoh: panjang garis Pantai Bali 436,5 km mengalami abrasi sepanjang 91,070 km, 20,8% (Survei 2007).
2. Perubahan lingkungan dan abrasi pantai mengancam keberadaan lahan produktif dan kawasan pariwisata.
3. Abrasi pantai pada daerah perbatasan menyebabkan bergesernya garis perbatasan dengan negara lain.
4. Akibat perubahan iklim global, intensitas dan magnitudo dari abrasi dan gelombang pasang/badai makin meningkat.
5. Penutupan muara sungai maupun pompa yang berdampak pada lalu lintas navigasi dan drainase.
6. Tingkat kerusakan pantai di Indonesia dari waktu ke waktu semakin meningkat tajam sementara alokasi anggaran untuk kegiatan pengamanan pantai tidak banyak berubah.



FENOMENA BERKEMBANG YANG HARUS DIPELAJARI, DISIKAPI, DAN DIANTISIPASI SECARA TEPAT

- Fenomena pertama adalah pemanasan global (*global warming*), menyebabkan dua hal:
 1. Pencairan es di kutub sehingga volume air di samudera bertambah dan berakibat pada kenaikan muka air laut (*sea level rise - SLR*).
 2. Perubahan pola iklim (*global climate change - GCC*) sehingga perilaku badai yang membangkitkan gelombang laut mungkin tidak mengikuti kaidah yang selama ini dipahami.
- Fenomena kedua adalah percepatan tekanan penduduk di kawasan pesisir padat.
- Penurunan permukaan tanah akibat beban langsung dan *subsidence* akibat pengambilan air tanah.
- Kerentanan masyarakat pesisir terhadap bencana alam laut makin tinggi karena jumlah penduduk yang ter-ekspos ke bencana makin besar.

3



KEBIJAKAN BIDANG PENGAMANAN PANTAI

1. Pendekatan pengamanan pantai harus berubah, selama ini penanganan umumnya dengan konstruksi fisik, kedepan pendekatan penanganannya dapat dilakukan dengan beberapa alternatif:
 - Pencegahan, mencegah investasi baru, baik swasta, masyarakat, maupun Pemerintah, pada daerah pantai yang rawan "bencana" melalui Pengaturan tata ruang dan sempadan pantai
 - Do nothing, untuk lokasi-lokasi yang rusak tetapi tidak ada sesuatu yang penting yang perlu dilindungi
 - Relokasi penduduk, atau prasarana dengan memperhatikan biaya sosial ekonomi (perlu koordinasi dengan pemerintah setempat)
 - Bangunan pengamanan pantai, untuk daerah pantai yang sudah berkembang dan benar-benar perlu diamankan (pilihan terakhir)
 - Penanaman kembali bakau untuk daerah pantai yang sudah rusak akibat abrasi/erosi

4

KEBIJAKAN BIDANG PENGAMANAN PANTAI (lanjutan)

2. Pengamanan pantai ditujukan untuk :

- Pengamanan pantai terhadap erosi/abrasi pada daerah perbatasan, pulau-pulau kecil, kawasan permukiman, infrastruktur, kawasan pertanian, serta pusat-pusat kegiatan ekonomi.
- Pengamanan terhadap banjir dari laut atau banjir rob (*coastal flooding*) akibat gelombang badai/pasang air laut.
- Stabilitas muara untuk mendukung lalu lintas navigasi.
- Mendukung revitalisasi kawasan pantai yang dilaksanakan sinergi dengan sektor-sektor terkait

3. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui:

- Pembangunan bangunan pengamanan pantai (baru)
- Rehabilitasi bangunan yang sudah ada.
- OP bangunan pengamanan pantai

5

REGULASI :

1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

- Pengendalian daya rusak air :
Upaya untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air
- Pengendalian daya rusak air dilakukan secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, tanggulangan dan pemulihan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

- Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi SDA, pendayagunaan SDA dan pengendalian daya rusak air.
- Pengendalian daya rusak air meliputi upaya :
 - a. Pencegahan sebelum bencana
 - b. Penanggulangan pada saat terjadi bencana
 - c. Pemulihan akibat bencana

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.9/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pengamanan Pantai

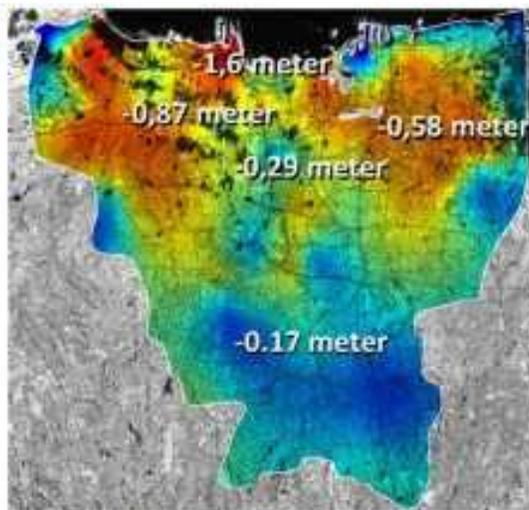
KONDISI PANTAI UTARA JAWA



Subsidence map of Jakarta 2000-2010:

Total subsidence -10 sampai -100 cm ; -1 sampai -17 cm/tahun

Sampai 2010 penurunan tanah terjadi di area yang lebih luas dan di beberapa tempat, tingkat penurunannya lebih besar dari rata-rata penurunan. Pembangunan perkotaan dan pengambilan air tanah yang berlebihan diduga menjadi sebab utama penurunan tanah di Jakarta



Jakarta Coastal Defense Strategy (JCDS) Study

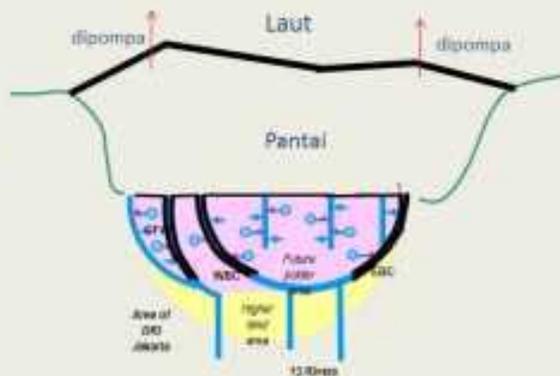
Data Perkembangan Pengambilan air tanah di DKI Jakarta



Rencana Jakarta Coastal Defense

Membuat tanggul laut bertujuan untuk:

1. Memisahkan pantai dan laut.
2. Menurunkan muka air di muara, sehingga muka air sungai akan lancar masuk muara
3. Mengurangi backwater
4. Menghindari intrusi



10

TAHAP 1 : PERKUATAN TANGGUL DAN PENAMPUNGAN AIR DI DARAT



TAHAP 1 : PERKUATAN TANGGUL DAN PENAMPUNGAN AIR DI DARAT



Specific Problem

► Land Subsidence & Rob



Development Layout

► Future Development



PENAHAN ABRASI PANTAI UTARA JAWA, DESA BENDA DAN KRANGKENG (1500 METER) KAB. INDRAMAYU

Maksud	: merencanakan pengamanan pantai utara jawa terhadap abrasi
Tujuan	: Untuk memperoleh desain penanggulangan abrasi pantai dengan memperhitungkan pengaruh penanggulangan abrasi tersebut terhadap kelangsungan ekosistem pantai dan keamanan wilayah sekitarnya .
Pelaksana Pekerjaan	: Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk – Cisanggarung
Sumber Dana	: APBN DIPA SatKer Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung, Tahun Anggaran 2012.

21

Gambaran Umum Wilayah Kajian



22

Sketsa Pantai Lokasi di Desa Benda, Kab. Indramayu



Sketsa Pantai Lokasi di Desa Kerangkeng, Kab. Indramayu



Alternatif Penanganan

PENANGANAN PANTAI BENDA, KAB. INDRAMAYU



25

Alternatif Penanganan

PENANGANAN PANTAI BENDA, KAB. INDRAMAYU



26

Alternatif Penanganan

PENANGANAN PANTAI KRANGKENG, KAB. INDRAMAYU



27

Alternatif Penanganan

PENANGANAN PANTAI KRANGKENG, KAB. INDRAMAYU



28

INTEGRATED WATER RESOURCES AND FLOOD MANAGEMENT PROJECT FOR SEMARANG



Kota Semarang

PULAU	BBWS / BWS	PENANGANAN PANTAI (km)
SUMATERA	BWS SUMATERA I	0.388
	BWS SUMATERA II	0.3
	BWS SUMATERA III	1.58
	BWS SUMATERA IV	2.07
	BWS SUMATERA V	1.5
	BWS SUMATERA VI	0.45
	BWS SUMATERA VII	2.742
	BBWS SUMATERA VIII	2.427
	BBWS MESUJI SEKAMPLING	0.35
JAWA	BBWS CIJUNG CIDADAU CIDIURIAN	1.08
	BBWS CIJUNG CIDADANE	-
	BBWS CITARUM	0.61
	BBWS CIMANUK CISINGGARUNG	0.77
	BBWS CITANDUY	-
	BBWS PEMALI JUANA	2
	BBWS SERAYU OPAK	-
	BBWS BENGAWAN SOLO	-
	BBWS BRANTAS	-

Sumber : UKP4 Direktorat Sungai dan Pantai, Kementerian PU

30

PULAU	BBWS / BWS	PENANGANAN PANTAI (km)
KALIMANTAN	BWS KALIMANTAN I	1.450
	BWS KALIMANTAN II	5.555
	BWS KALIMANTAN III	8.43
SULAWESI	BWS SULAWESI I	2.9
	BWS SULAWESI II	0.4
	BWS SULAWESI III	0.2
	BWS SULAWESI IV	1.6
	BBWS POMPENGAN JENEBERANG	-
BALI	BWS BALI PENIDA	1.9
NUSA TENGGARA BARAT	BWS NUSA TENGGARA I	4
NUSA TENGGARA TIMUR	BWS NUSA TENGGARA II	3.2
MALUKU	BWS MALUKU	-
MALUKU UTARA	BWS MALUKU UTARA	1.4
PAPUA	BWS PAPUA	-
	BBWS PAPUA BARAT	0.2

Sumber : UKP4 Direktorat Sungai dan Pantai, Kementerian PU





LOCATION OF RETARDING POND & PUMPING STATION

Loket Stasiun Tawang



37



38



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
DIREKTORAT SUNGAI DAN PANTAI

TERIMA KASIH



Makalah 4.

Pemetaan Status dan Kerusakan Wilayah Pesisir Pantai Utara Jawa (Pantura): Studi Kasus di Jawa Tengah

Oleh : Dr. Rudhi Pribadi, Jurusan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro – Jawa Tengah

**PEMETAAN STATUS DAN KERUSAKAN
WILAYAH PESISIR PANTURA JAWA:
STUDI KASUS DI JAWA TENGAH**



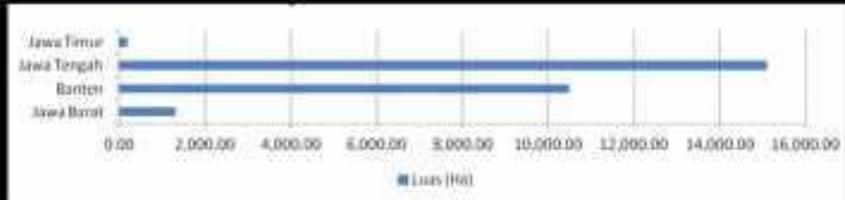
 Rudhi Pribadi – Muh. Helmi
Jurusan Ilmu Kelautan,
FPIK UNDIP Tembalang,
Semarang 50275
rudhi_pribadi@yahoo.co.uk

**TABEL IDENTIFIKASI KERUSAKAN DAN LUASAN EKOSISTEM DI
PESISIR UTARA PULAU JAWA**

No.	Provinsi	Erosi/Abrasi (Ha)	Sedimentasi (Ha)	Luasan (Ha)		
				Mangrove	Terumbu Karang	Padang Lamun
1.	Jawa Barat	1.310,92	2.273,69	2.228,65	2.591,47	-
2.	Banten	10.487,46	-	339,26	368,33	1.987,90
3.	Jawa Tengah	15.083,80	25.064,67	4.879,16	885,41	248,26
4.	Jawa Timur	180,80	4,0	398,73	900,48	124,45
	JUMLAH	27.072,98	27.342,36	7.845,80	4.745,69	2.360,61

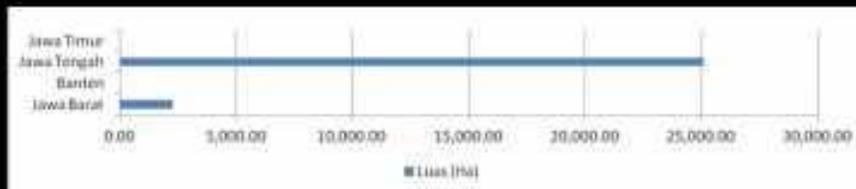
 **KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Direktorat Pesisir dan Kelautan
2011

EROSI/ABRASI (HA) DI PANTAI UTARA PULAU JAWA



3

SEDIMENTASI (HA) DI PANTAI UTARA PULAU JAWA

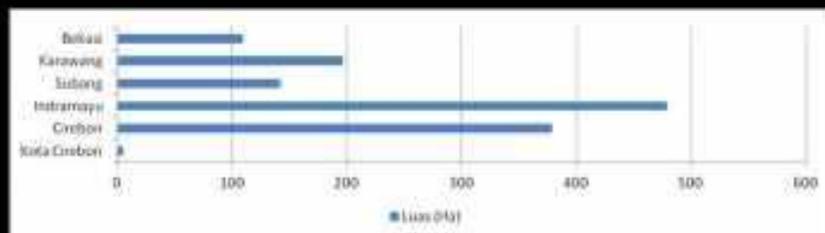


4

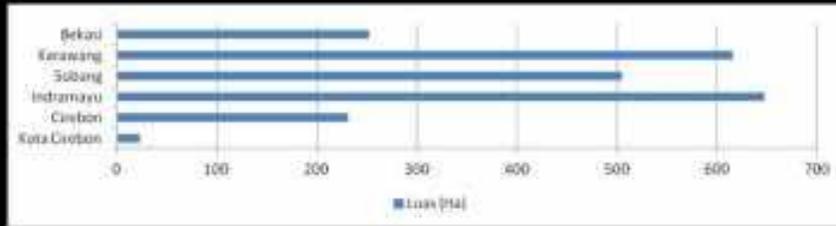
TABEL KERUSAKAN PESISIR UTARA PROVINSI JAWA BARAT

No.	Kab./Kota	Erosi/Abrasi (Ha)	Sedimentasi (Ha)	Luasan (Ha)		
				Mangrove	Terumbu Karang	Lamun
1	Kota Cirebon	5.1	22.64	0	0	0
2	Cirebon	378.94	231.08	74.97	0	0
3	Indramayu	479.34	647.38	378.51	500	0
4	Subang	141.91	504.82	1,383.67	0	0
5	Karawang	196.29	615.58	76.99	2,091.47	0
6	Bekasi	109.34	252.19	314.51	0	0
	JUMLAH	1,310.92	2,273.69	2,228.65	2,591.47	0.00

EROSI/ABRASI (HA) DI PANTAI UTARA JAWA BARAT



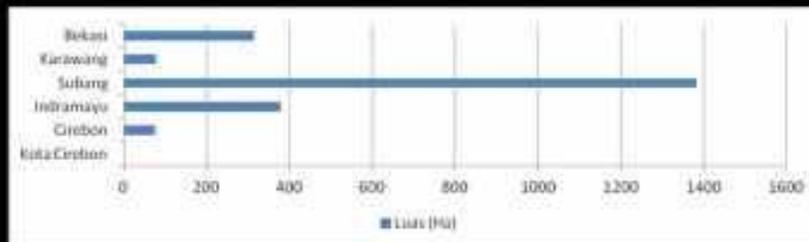
SEDIMENTASI (HA) DI PANTAI UTARA JAWA BARAT



Sedimentasi di Kecamatan Pangnanan, Jawa Barat

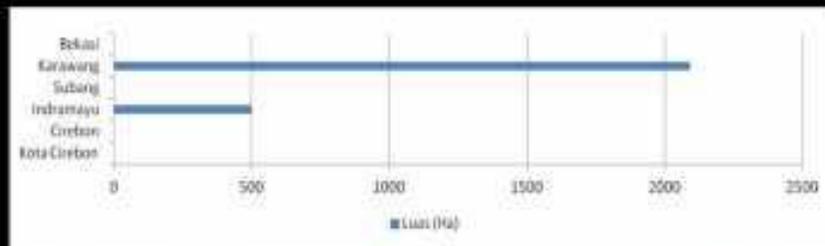
7

LUAS AREA MANGROVE (HA) DI PANTAI UTARA JAWA BARAT



8

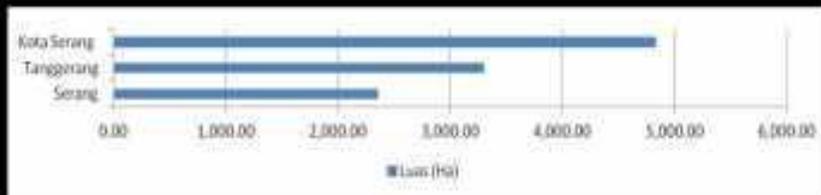
AREA TERUMBU KARANG (HA) DI PANTAI UTARA JAWA BARAT



TABEL IDENTIFIKASI KERUSAKAN PESISIR UTARA PROVINSI BANTEN

No.	Kab/Kota	Erosi/ Abrasi (Ha)	Sedimentasi (Ha)	Luasan (Ha)		
				Mangrove	Terumbu Karang	Padang Lamun
1.	Serang	2.355,17	-	277,98	54,85	1.487,98
2.	Tangerang	3.302,29	-	46,41	-	211,93
3.	Kota Serang	4.830,00	-	14,87	313,48	287,97
	JUMLAH	10.487,46	-	339,26	368,33	1.987,90

EROSI/ABRASI (HA) DI PANTAI UTARA PROVINSI BANTEN



Desa Domas Pontang, Banten



Desa Keramat, Banten

t1

LUAS AREA MANGROVE (HA) DI PANTAI UTARA PROVINSI BANTEN



Bomlestari Tanara



Desa Muara Teluk Naga

t2

LUAS AREA PADANG LAMUN (HA) DI PANTAI UTARA PROVINSI BANTEN



Kaliwadas Bojanegara



Pulau Kambing

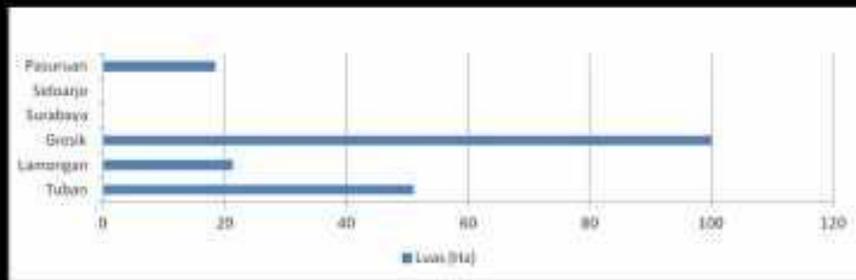
13

TABEL IDENTIFIKASI KERUSAKAN PESISIR UTARA PROVINSI JAWA TIMUR

No.	Kab/Kota	Erosi/Abrasi (Ha)	Sedimentasi (Ha)	Luas (Ha)		
				Mangrove	Terumbu Karang	Padang Lamun
1	Tuban	51,0	1,0	8,8	154,8	0
2	Lamongan	21,3	-	25,3	2,8	1,5
3	Gresik	100,0	-	20,8	-	1,5
4	Surabaya	-	-	22,7	-	-
5	Sidoarjo	-	3,0	64,5	742,9	121,5
6	Pasuruan	18,5	-	256,8	-	-
	JUMLAH	190,8	4,0	398,7	900,5	124,5

14

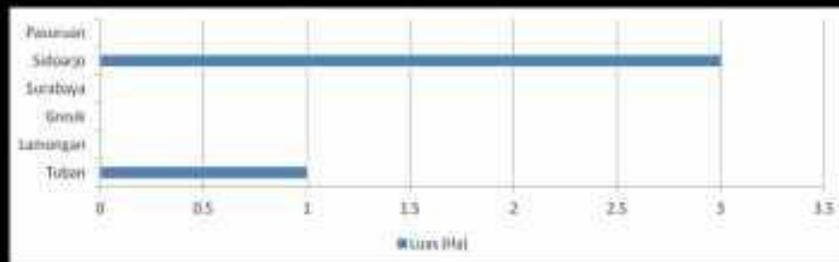
EROSI/ABRASI (HA) DI PANTAI UTARA JAWA TIMUR



Erosi di Gresikharjo, Palang, Tuban

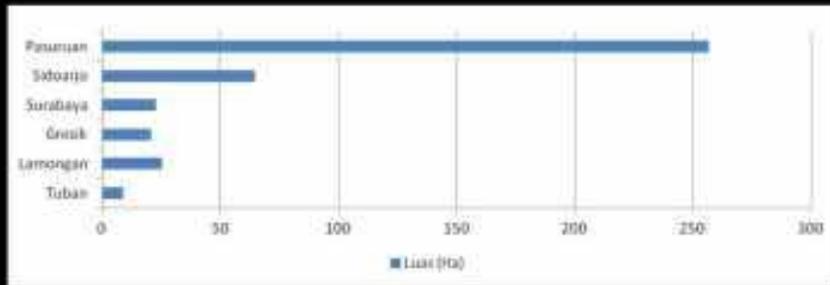
19

SEDIMENTASI (HA) DI PANTAI UTARA JAWA TIMUR



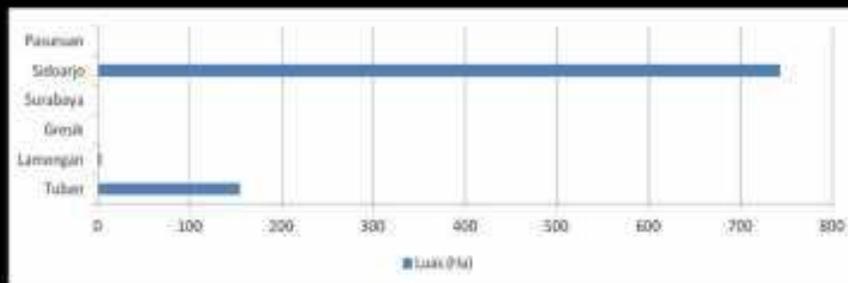
20

LUAS AREA MANGROVE (HA) DI PANTAI UTARA JAWA TIMUR



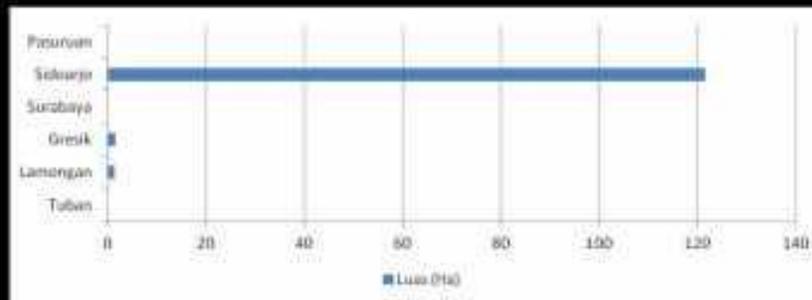
17

LUAS AREA TERUMBU KARANG (HA) DI PANTAI UTARA JAWA TIMUR



18

LUAS AREA PADANG LAMUN (HA) DI PANTAI UTARA JAWA TIMUR



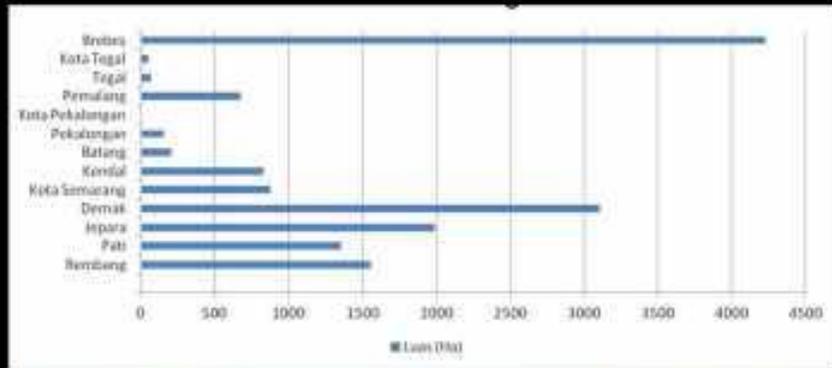
19

KERUSAKAN PESISIR UTARA PROVINSI JAWA TENGAH

No.	Kab./Kota	Erosi/Abrasi (Ha)	Sedimentasi (Ha)	Luasan (Ha)		
				Mangrove	Terumbu Karang	Lamun
1	Bambang	1,552.69	330.16	296.13	365	144.7
2	Pati	1,352.87	3,337.06	351.85	0	0
3	Jejara	1,987.88	985.39	190.01	580.88	103.56
4	Demak	3,105.76	3,658.94	2,309.10	0	0
5	Kota Semarang	872.9	646.33	163.3	0	0
6	Kendal	830.61	2,173.41	394.85	0	0
7	Batang	203.46	884.03	186.4	0	0
8	Pekalongan	154.12	153.78	70.88	0	0
9	Kota Pekalongan	0.48	701.38	15.35	0	0
10	Pemalang	675.01	4,459.22	333.32	0	0
11	Tegal	67.28	1,375.61	32.64	19.53	0
12	Kota Tegal	49.96	548.78	85.67	0	0
13	Brebes	4,230.78	5,810.58	449.66	0	0
	IJMLAH	15,083.80	25,064.67	4,879.16	885.41	248.26

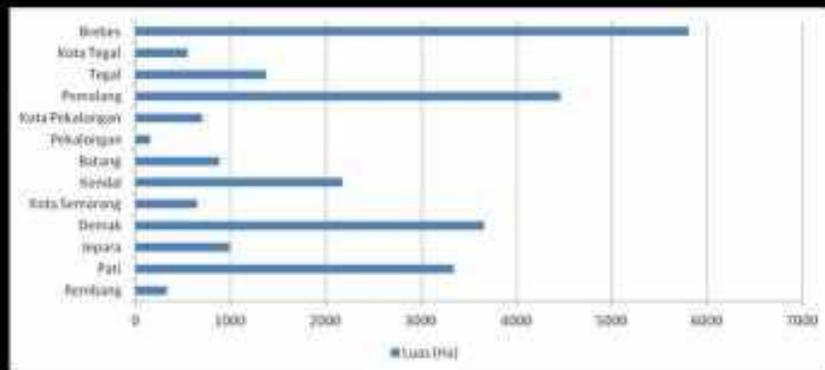
20

EROSI/ABRASI (HA) DI PANTAI UTARA PROVINSI JAWA TENGAH



21

SEDIMENTASI (HA) DI PANTAI UTARA JAWA TENGAH



22

LUAS KERUSAKAN PANTAI DI PANTURA JATENG (ha)

No	Kabupaten/Kota	Erosi / Abrasi	Akresi / Sedimentasi
1	Rembang	852,86	206,86
2	Pati	514,99	1.458,26
3	Jepara	938,73	445,78
4	Demak	1.016,22	1.646,76
5	Kota Semarang	342,67	318,74
6	Kendal	317,44	1.005,85
7	Batang	101,73	442,02
8	Kota Pekalongan	0,24	350,69
9	Pekalongan	77,06	76,89
10	Pemalang	231,04	2.229,61
11	Tegal	33,64	1.224,04
12	Kota Tegal	24,98	274,39
13	Brebes	2.115,39	2.905,29
Jumlah		6.566,97	12.585,19

23



24



29



28



27



28



29



30

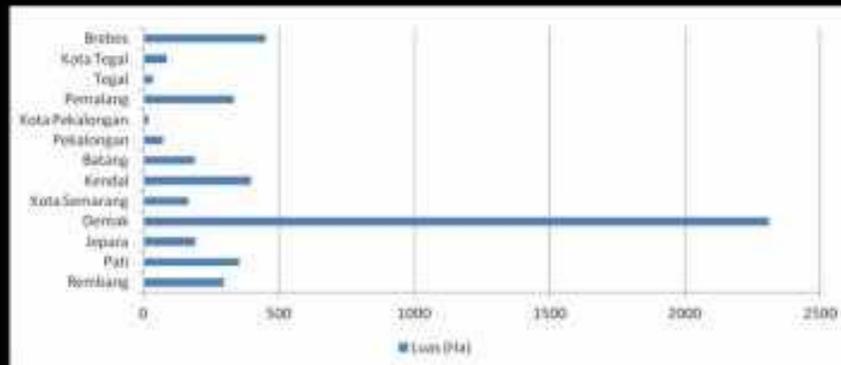


31



32

LUAS AREA MANGROVE (HA) DI PANTAI UTARA JAWA TENGAH



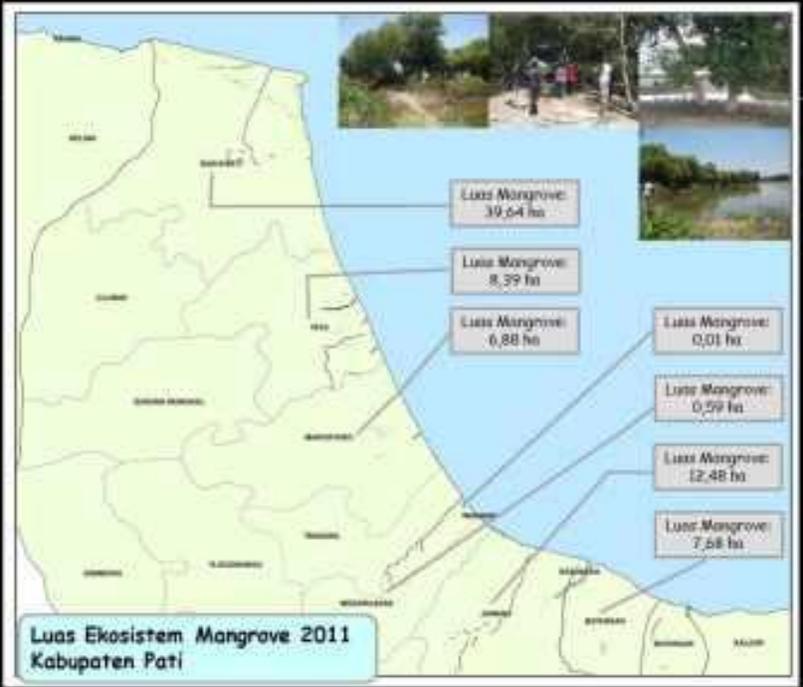
LUAS AREA EKOSISTEM MANGROVE

No	Kab/Kota	Luas (ha)	Prosentase (%)
1	Rembang	155,61	6,33
2	Pati	75,66	3,08
3	Jepara	203,80	8,29
4	Demak	1.154,55	46,96
5	Kota Semarang	94,39	3,84
6	Kendal	238,88	9,72
7	Batang	65,85	2,68
8	Kota Pekalongan	7,57	0,31
9	Pekalongan	12,49	0,51
10	Pemalang	167,76	6,82
11	Tegal	19,34	0,79
12	Kota Tegal	39,44	1,60
13	Brebes	223,07	9,07
	Total	2.458,40	100,00

Sumber : Interpretasi Citra Satelit ALOS Tahun 2011



37



38





Luas Ekosistem Mangrove 2011 Kota Semarang

41



Luas Ekosistem Mangrove 2011 Kabupaten Kendal

42

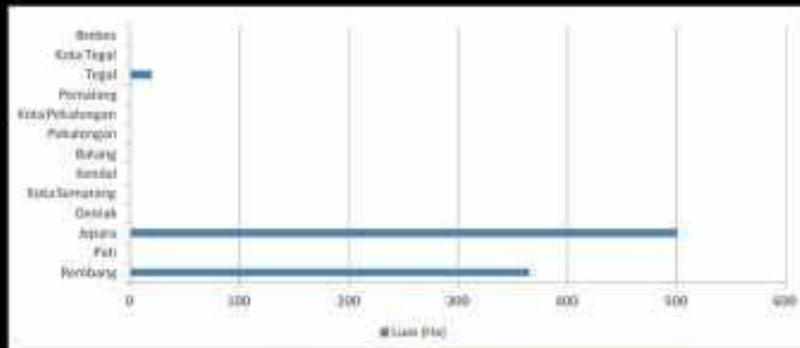






47

LUAS AREA TERUMBU KARANG (HA) DI PANTAI UTARA JAWA TENGAH



48

LUAS AREA PADANG LAMUN (HA) DI PANTAI UTARA JAWA TENGAH



DAERAH PRIORITAS REHABILITASI DI PANTAI UTARA JAWA TENGAH



Untuk menentukan prioritas daerah rehabilitasi dilakukan dengan cara skoring.

Parameter Skoring Ekosistem Mangrove :

- Keanekaragaman (H')
- Kerapatan (Ind./ha)
- Tutupan mangrove
- Perbandingan Pantai Bermangrove dan tanpa Mangrove

Parameter Skoring Ekosistem Terumbu Karang dan Lamun :

- Tutupan (%) Karang keras hidup (HCL), Karang keras mati (HCD), Karang lunak (SC), Makro alga (MA), Pecahan karang (RB), Batu (RO).
- Tutupan lamun (%).

Parameter Skoring Kerusakan Pantai:

- Luas abrasi/erosi (ha)

34

Rekapitulasi Data Parameter Kerusakan Ekosistem Mangrove

No	Kabupaten/Kota	H'	K (Ind./ha)	TM (%)	PBm (%)
1	Rembang	1,71	3.155	6,33	0,96
2	Pati	0,00	2.828	3,08	0,56
3	Jepara	1,54	3.172	8,29	1,26
4	Demak	1,30	2.278	46,96	4,18
5	Kota Semarang	0,83	3.875	3,84	3,52
6	Kendal	0,03	1.967	9,72	0,86
7	Batang	1,70	1.933	2,68	0,63
8	Kota Pekalongan	0,00	2.433	0,31	0,46
9	Pekalongan	0,00	5.600	0,51	1,15
10	Pemalang	1,62	2.344	6,82	3,79
11	Tegal	0,00	3.533	0,79	0,90
12	Kota Tegal	0,00	5.200	1,60	2,80
13	Brebes	0,00	1.633	9,07	0,76

Keterangan :

H' : Keanekaragaman Mangrove

K : Kerapatan Mangrove

TM : Tutupan Mangrove berdasarkan perbandingan luas mangrove Kabupaten/Kota dan Luas Mangrove Total

PBm : Prosentase antara Pantai Bermangrove dan Pantai Tidak Bermangrove di Pantai Jawa Tengah

Rekapitulasi Data Parameter Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang

No	Kabupaten	Lokasi Terumbu Karang	HCL	HCD	SC	MA	RB	RO
1	Rembang	Karang Nggurian	26,5	3,5	6,0	1,0	21,0	15,0
		Karang Pulau Gede	18,8	8,2	19,4	0,0	16,5	11,2
		Karang Pulau Marongan	1,5	11,0	0,0	0,0	0,0	6,0
2	Jepara	Karang Ujungpiring	33,0	24,3	8,7	5,9	0,0	16,1
		Karang Pantai Bandengan	8,8	5,0	0,0	15,0	0,0	33,8
		Karang Pantai Kartini	20,4	21,7	0,8	6,3	7,9	29,6
		Karang Pulau Panjang	28,9	18,6	10,4	6,4	0,7	17,9
		Karang Pantai Teluk Awur	24,2	12,5	0,0	10,8	0,0	35,0
3	Tegal	Karang Jeruk	16,5	6,9	2,3	3,1	16,5	38,5

Rekapitulasi Data Parameter Kerusakan Ekosistem Padang Lamun

No	Kabupaten	Tutupan (%)
1	Rembang	24,5
2	Jepara	14,9



Rekapitulasi Data Parameter Kerusakan Pantai

Luas Abrasi/erosi dan Akresi/sedimentasi di Pantura Jawa Tengah (ha)

No	Kabupaten/Kota	Abrasi/erosi	Akresi / Sedimentasi
1	Rembang	852,86	206,86
2	Pati	514,99	1.458,26
3	Jepara	938,73	445,78
4	Demak	1.016,22	1.646,76
5	Kota Semarang	342,67	318,74
6	Kendal	317,44	1.005,85
7	Batang	101,73	442,02
8	Kota Pekalongan	0,24	350,69
9	Pekalongan	77,06	76,89
10	Pemalang	231,04	2.229,61
11	Tegal	33,64	1.224,04
12	Kota Tegal	24,98	274,39
13	Brebes	2.115,39	2.905,29
	Jumlah	6.566,97	12.585,19

Rekapitulasi Skor

No	Kabupaten/Kota	Mangrove	Abrasi /erosi	Jml	Terumbu Karang	Padang Lamun	Jml
1	Rembang	8	3	11	6	1	7
2	Pati	6	3	9	-	-	-
3	Jepara	10	1	11	7	1	8
4	Demak	10	1	11	-	-	-
5	Kota Semarang	8	1	9	-	-	-
6	Kendal	6	3	9	-	-	-
7	Batang	5	3	8	-	-	-
8	Kota Pekalongan	5	3	8	-	-	-
9	Pekalongan	7	3	10	-	-	-
10	Pemalang	9	2	11	-	-	-
11	Tegal	6	3	9	7	-	7
12	Kota Tegal	8	3	11	-	-	-
13	Brebes	6	1	7	-	-	-

98

Daerah Prioritas Rehabilitasi

No	Prioritas	Jumlah Skor	Kabupaten/Kota
1	I	7	Brebes, Tegal, Rembang, Jepara
2	II	8	Batang, Kota Pekalongan
3	III	9	Pati, Kota Semarang, Kendal
4	IV	10	Pekalongan
5	V	11	Demak, Pemalang, Kota Tegal

87

PRINSIP DASAR REHABILITASI EKOSISTEM



88



UTAMAKAN REHABILITASI EKOLOGIS



JENIS MANGROVE SEJATI

Jumlah : 8 jenis



1. *Avicennia marina*
2. *Avicennia alba*
3. *Rhizophora mucronata*
4. *Rhizophora apiculata*
5. *Rhizophora stylosa*
6. *Sonneratia alba*
7. *Sonneratia caseolaris*
8. *Bruguiera cylindrica*

JENIS MANGROVE MINOR

Jumlah : 17 Jenis

1. *Achanthus illicifolius*
2. *Achanthus ebracteaty*
3. *Calotropis gigantea*
4. *Ipomoea maxima*
5. *Ipomoea pes-caprae*
6. *Ipomoea gracilis*
7. *Sesuvium portulacastrum*
8. *Spinifex littoreus*
9. *Excoecaria agallocha*
10. *Acrostichum aureum*
11. *Aegiceras corniculatum*
12. *Carbera manghas*
13. *Cenops tagal*
14. *Lumnitzera racemosa*
15. *Pandanus tectorius*
16. *Deris trifolita*
17. *Nypa fruticans*



JENIS MANGROVE ASOSIASI

Jumlah : 33 Jenis

1. *Terminalia catappa*
2. *Azadirachta indica*
3. *Calycopteris floribunda*
4. *Cocos nucifera*
5. *Cyperus sp.*
6. *Ficus curtipes*
7. *Fimbristylis cymosa*
8. *Glochidion littorale*
9. *Leptochloa neesii*
10. *Mimosa pudica*
11. *Canavalia maritima*
12. *Cassy filiformis*
13. *Casuarina equisetifolia*
14. *Hibiscus tiliaceus*
15. *Pluchea indica*
16. *Stachytarpheta jamaicensis*
17. *Thespesia populnea*
18. *Laucaena leucocephala*
19. *Flagellaria indica*
20. *Abrus precatorius*
21. *Erythrina orientalis*
22. *Cathormion umbellatum*
23. *Cyperus javanicus*
24. *Cyperus stoloniferus*
25. *Gluta velutina*
26. *Morinda citrifolia*
27. *Ricinus communis*
28. *Salacia chinensis*
29. *Seirpus sp*
30. *Serianthes grandiflora*
31. *Sesbonia grandiflora*
32. *Sidorompi folia*
33. *Thypha angustifolia*

63

Mangrove Asosiasi



Terminalia cattapa



Casuarina equisetifolia



Hibiscus tiliaceus



Dadap Berduri

64

REHABILITASI: LAKUKAN DENGAN BENAR

Langkah Rehabilitasi :

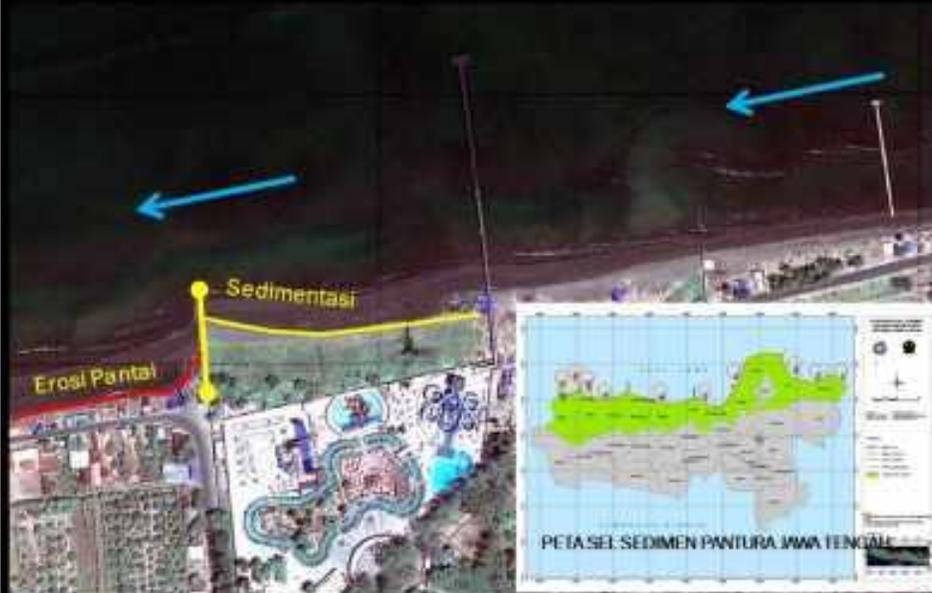
1. Perencanaan
2. Pengkajian
3. Prakondisi masyarakat
4. Pelaksanaan rehabilitasi
5. Pemantauan & evaluasi
6. Publikasi



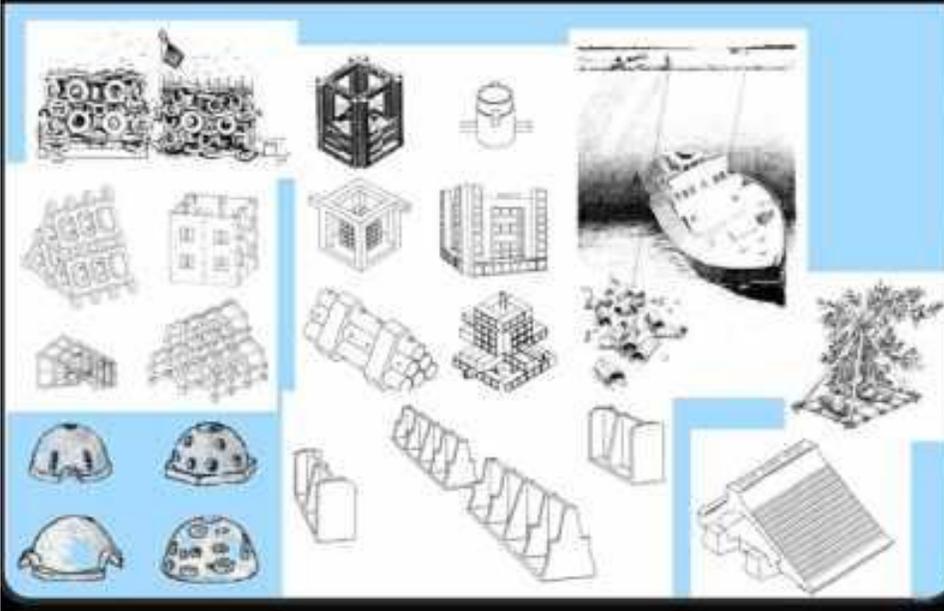
TETAP LAKUKAN PENDAMPINGAN



REHABILITASI FISIK : PERHATIKAN KAJIDAH



Contoh Bentuk Struktur TKB :



Jenis Terumbu Buatan



Contoh transplantasi





Proyek Transplantasi di Pantai Kuta, Bali 2006

72

Fragmen karang direkatkan pada bahan substrat dari Batu alam



73

HIDUP LEBIH AKRAB DENGAN EKOSISTEM



71

Penetapan Kawasan Lindung



REHABILITASI : SIAPA MELAKUKAN APA, BAGAIMANA DAN DIMANA?



INTEGRASI, KOORDINASI, SINERGI, HARMONI

78

KKMD

KELOMPOK KERJA MANGROVE DAERAH

SALAH SATU TUGAS KKMN → MENDORONG TERBENTUKNYA KKMD DI DAERAH (PROV/KAB/KOTA) YANG MEMILIKI EKOSISTEM MANGROVE

Terakhir dengan Surat Dirjen Bangda No. 188.41/360/IV/Bangda tanggal 31. Maret 2008 untuk membentuk KKMD

BELUM SELURUH DAERAH SAAT INI MEMILIKI KKMD

79

TUGAS UTAMA KKMD :

- Mendorong koordinasi di nas/instansi terkait (keterkaitan hulu-hilir) dalam pelaksanaan program terkait keberlanjutan ekosistem mangrove;
- Mendorong di nas/instansi/pihak terkait untuk sinergitas pengelolaan ekosistem mangrove;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi terpadu pengelolaan ekosistem mangrove di masing2 daerah;
- Mengembangkan kerjasama antar daerah terkait pengelolaan ekosistem mangrove;
- Mengembangkan dan mensinergikan data dan informasi ekosistem mangrove;
- Menginformasikan kepada KKMN terkait isu-isu pengelolaan mangrove di masing-masing daerah yang memerlukan penyelesaian tingkat nasional.

77

MATRIKS MONITORING DAN EVALUASI KONDISI MANGROVE DAN PESISIR PANTURA JAWA TENGAH

DAERAH/ SAR/NOTA	MONDOKI VEGETASI	MONDOKI SIKLOLOGIS	LANSIUS	PARTISIPASI MASYARAKAT	PERAN PENSIKSIAN	PERAN PEMATA	PERAN LER	REKORDA I	FORSA Mangrove	EFESIENSI
KAB. BOPKRAH	Penyakit umum ketidakefektifan di darat - tidak mangrove di darat	ditanen Pemantauan secara berkala - reguler	Tanah: Substansi dan garam. Pemantauan substansi PLTU	Ada tidak masyarakat yang peduli. Kegiatan (Dokumentasi, Tawar, dan lain-lain) Masyarakat pemantau lingkungan darat.	Ada laporan pemantauan dari APD dan APN			Penyakit I & II	Salah	Salah
KAB. BATI	Keperawatan pemantau ketidakefektifan	ditanen Pemantauan secara berkala - reguler	Tanah: Substansi dan garam	Ada tidak masyarakat yang peduli (Salah satu)	Ada laporan pemantauan dari APN dan APD			Penyakit I & II	Salah ada pemantau lingkungan pemantauan mangrove	Salah
KAB. BOPKRAH	Salah pemantau ketidakefektifan	ditanen	Tanah: Substansi	Ada tidak masyarakat yang peduli. Kegiatan (Dokumentasi, Tawar, dan lain-lain) Masyarakat	Ada laporan pemantauan dari APD dan APN			Salah pemantau	Salah ada	Salah
KAB. BOPKRAH	Keperawatan pemantau ketidakefektifan	ditanen Saluran pemantau Saluran pemantauan. Ditanen Pemantauan secara berkala - reguler	Tanah: Substansi dan garam. Pemantauan yang sudah ada	Ada tidak masyarakat yang peduli. Kegiatan (Dokumentasi, Tawar, dan lain-lain)	Ada laporan pemantauan dari APD dan APN		Ada APD dan APN	Salah pemantau	Salah	

78



Makalah 5.

Peran Kelompok Kerja Magrove Daerah (KKMD) Dalam Mendorong Percepatan Pengelolaan Wilayah Pesisir Berkelanjutan

Oleh : Ir. Diah Indrajati, M.Sc, Kasubdit Konservasi Mangrove, Direktorat Fasilitas Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri

**PERAN KKMD DALAM
MENDORONG PERCEPATAN
PENGELOLAAN WILAYAH
PESISIR BERKELANJUTAN**

Penyusun: OLEH
Dr. SJOEJAN BAKAR, M.Sc
DIREKTUR FASILITASI PENATAAN RUANG
DAN LINGKUNGAN HIDUP

PADA LAMPIRAN SEMINAR NASIONAL "ADAPTASI PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR BERKELANJUTAN;
PENANGANAN KERUSAKAN PESISIR PANTAI UTARA JAWA"
NOVOTEL - SEMARANG, TANGGAL 19 OKTOBER 2012

 **DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

Page-1

LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN KKMN

- Sebagai salah satu bentuk kepedulian thd semakin meningkatnya kerusakan ekosistem mangrove, serta menyadari bahwa pengelolaan ekosistem mangrove harus ditangani secara terpadu;
- Sebagai salah satu upaya penguatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi lintas sektor/lembaga dalam pengelolaan ekosistem mangrove;
- Pada tahun 2006 telah dibentuk Kelompok Kerja Mangrove Nasional (KKMN);
- Ketua KKMN dijabat oleh pejabat Eselon I Kementerian/ Lembaga terkait secara bergantian setiap tahun dan untuk tahun 2012 ini Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah - Kementerian Dalam Negeri mendapat giliran menjadi Ketua, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No: 660.05/101A Tahun 2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Mangrove Nasional Tahun 2012;

TUGAS KKMN

1. Mendorong dan memfasilitasi pemerintah daerah dalam membentuk kelompok kerja mangrove daerah;
2. Mendorong penerapan program dan kegiatan sesuai dengan strategi nasional pengelolaan ekosistem mangrove;
3. Mensinergikan pelaksanaan program pengelolaan mangrove antar sektor, pusat dengan daerah, dan dengan stakeholder lainnya;
4. Mendorong terwujudnya data dasar mangrove yang dapat digunakan sebagai referensi data mangrove di Indonesia;
5. Melakukan identifikasi dan mencari solusi tentang permasalahan pengelolaan ekosistem mangrove di Indonesia;
6. Memfasilitasi dalam mencari peluang pendanaan selain APBN dan APBD untuk pengelolaan ekosistem mangrove di Indonesia;
7. Mendorong tumbuhnya percobaan (demosites) pengelolaan mangrove berkelanjutan dan melakukan upaya aksi langsung di lapangan dalam memecahkan permasalahan pengelolaan mangrove di Indonesia;
8. Mendorong dan memfasilitasi upaya peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat dalam pelestarian mangrove di Indonesia;
9. Mensinergikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan ekosistem mangrove; dan
10. Melaksanakan tugas lain berdasarkan arahan Tim Pembina.

KEANGGOTAAN KKMN 2012

- o **Tim Pembina:** Eselon I dari: Kemendagri, Kemenhut, KKP, KLH, LIPI, Kemen PDT, Kemen PU, Bappenas, BIG, BPN, Kejaksaan, Bareskrim Polri.
- o **Tim Kerja:** Eselon II dari: Kemendagri, Kemenhut, KKP, KLH, LIPI, Kemen PDT, Kemen PU, Bappenas, BIG, BPN, Kejaksaan, Bareskrim Polri, Akademisi, Pakar, Praktisi, LSM.
- o **Tim Sekretariat:** Eselon III dari: Kemendagri, Kemenhut, KKP, KLH, BIG, WIIP-Sekretariat.

KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE

- o Telah terbit Perpres No. 73 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove;
- o Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove yang selanjutnya disingkat SNPEM adalah upaya dalam bentuk kebijakan dan program untuk terwujudnya pengelolaan ekosistem mangrove lestari dan masyarakat sejahtera berkelanjutan berdasarkan sumber daya yang tersedia sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

STRATEGI BIDANG KELEMBAGAAN

1. Meningkatkan peran pemangku kepentingan pengelolaan (*management authority*) dan pemangku kepentingan penelitian (*scientific authority*) dalam pengelolaan ekosistem mangrove
2. Menciptakan mekanisme kerja sama yang sinergis antar pihak
3. Menciptakan koordinasi dan integrasi program antar pihak
4. Meningkatkan kapasitas institusi pusat, daerah dan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove

STRATEGI BIDANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Memantapkan kebijakan bersama dalam pengelolaan ekosistem mangrove (penguatan kapasitas Pemda dalam pembuatan Perda terkait mangrove)
2. Mengakomodasikan status ekosistem mangrove dalam tata ruang wilayah pesisir
3. Melaksanakan penataan dan penegakkan hukum pengelolaan ekosistem mangrove

TANTANGAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (1)



TANTANGAN PELAKSANAAN

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (2): Pemilukada Dan Kesenambungan Pembangunan

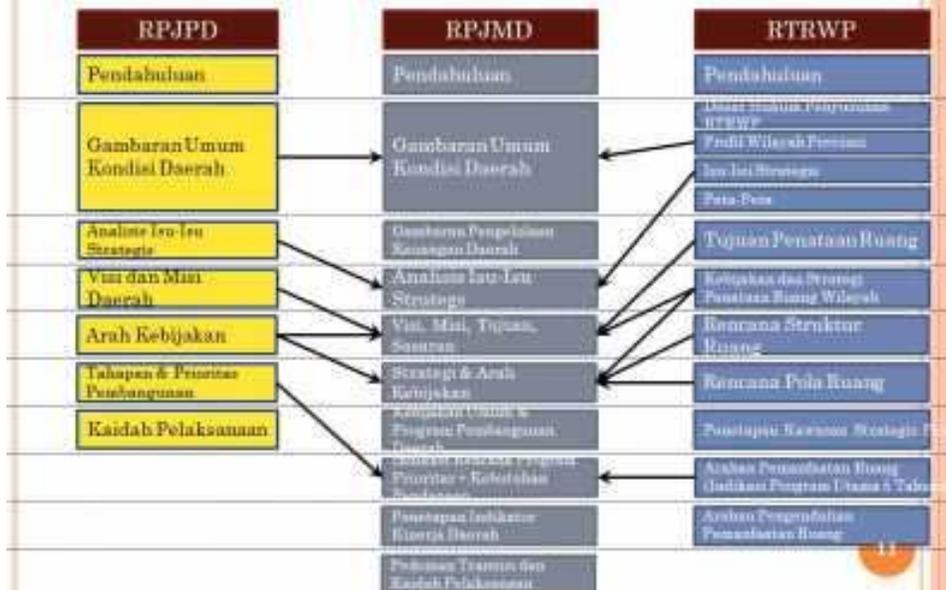


TANTANGAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (3)

KERANGKA PIKIR DASAR KERJA PERENCANAAN



KETERKAITAN MUATAN ANTARA RPJPD-RTRWP-DENGAN RPJMD



Keterangan: → Arah Keterkaitan

Sumber: (1) PP No. 08/2008, (2) Permenlog No. 54/2010, (3) Permen PU No. 15/PER/W/2009, Lampiran 2

Formir RTRW

No	Program Utama	Lokasi	Sasaran	Sasaran Data	Indikator Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan			
						2011	2012	2013	2014
A	Perencanaan Struktur Ruang								
1	Perencanaan Pola Ruang								
2	Perencanaan Sistem Perencanaan								
3	Perencanaan Tata Ruang								

BIB.7. MENYERONG TERBUKA RUMAH RUMAH KEMERDEKAAN DAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Kategori Indikator Pembangunan	Indikator Kualitas Pembangunan	Tahun	Target Nasional Pembangunan						Indikator Kualitas Pembangunan	Tahun Indikator Kualitas Pembangunan	Peta Kawasan Perencanaan Kawasan						Lokasi Kawasan
			2011	2012	2013	2014	2015	2016			2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

Tipe 1.1 : Menetapkan indikator pembangunan yang berkaitan dengan kebijakan dan strategi pembangunan

Formir RPJMD

PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

1. *Interdependency* (saling ketergantungan/keterkaitan)
 - Antar wilayah
 - Antar sektor
 - Antar tingkat pemerintahan
 - Antar pemangku kepentingan
2. *Equilibrium* (keseimbangan)
 - Antara kepentingan ekonomi, sosial budaya, lingkungan
3. *Justice* (keadilan)
 - Antar kelompok masyarakat
 - Antar generasi

HARUS DAPAT TERINTEGRASI
KE DALAM PROSES PERENCANAAN : SPASIAL & A-SPASIAL

HOW ??

- KOMITMEN
- TRANSPARAN
- DUDUK BERSAMA
- SALING SINERGI
- KETERLIBATAN AKTIF STAKEHOLDERS
- ADA "COMMON DENOMINATOR" → kerisauan bersama dalam mengelola PANTURA
- BASELINE DATA → menunjukkan tren 5 tahun terakhir thd issue Pantura (sosbud+ekonomi+lingkungan)

STATUS TATA RUANG

- o Status sekarang: 14 Perda RTRW Provinsi (42.4 %) dan 145 Perda RTRW Kabupaten (36.4 %), 45 Perda RTRW Kota (48.4 %), → instrumen pengendali kerusakan mangrove di daerah
- o Kondisi Perda RTRW di wilayah Pantura:
 - 100 % Perda RTRW Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur;
 - 100 % Perda RTRW Kabupaten dan Kota di Pantura Prov. Banten;
 - 86 % Perda RTRW Kabupaten dan Kota di Pantura Prov. Jawa Barat, sementara Ranperda RTRW Kab. Bekasi sudah mendapatkan Persetujuan Substansi Menteri PU;
 - 100 % Perda RTRW Kabupaten dan Kota di Pantura Prov. Jawa Tengah (3 kota, 11 kab);
 - 62,5 % Perda RTRW Kabupaten dan Kota di Pantura Prov. Jawa Timur, sementara Ranperda RTRW Kab. Situbondo dan Kab. Banyuwangi sudah mendapatkan Persetujuan Substansi Menteri PU dan Ranperda RTRW Kota Surabaya masih dalam proses Rekomendasi Gubernur Jawa Timur.

13

RPJPD/RPJMD

- o Beberapa Kabupaten/Kota di Pantura selesai melaksanakan Pemilukada pada tahun 2012 → proses penyusunan RPJMD (6 bln setelah definitif hrs sdh menjadi PERDA);
- o Beberapa Kabupaten/Kota di Pantura baru akan melaksanakan Pemilukada pada tahun 2013 → proses persiapan RPJMD;
- o Beberapa Kabupaten/Kota di Pantura sedang melaksanakan evaluasi RPJMD

14

PERAN KKMD :

- o Saat ini :23 KKMD Provinsi dan 9 KKMD Kabupaten
- o Tugas KKMD:
 - a. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kelompok Kerja Mangrove Nasional;
 - b. Mendorong pengembangan dan integrasi data/informasi kondisi serta pengelolaan ekosistem mangrove;
 - c. Memberikan saran dan masukan terhadap alternatif solusi pemecahan berbagai permasalahan dalam penanganan dan pengelolaan ekosistem mangrove;
 - d. Mensinergikan kegiatan stakeholder dalam penanganan dan pengelolaan ekosistem mangrove melalui fasilitasi dan koordinasi perencanaan, rehabilitasi, konservasi, dan pemanfaatan ekosistem mangrove;
 - e. Membantu melakukan pembinaan dan sosialisasi untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam penanganan dan pelestarian ekosistem mangrove;
 - f. Merumuskan bahan untuk materi kebijakan daerah dalam rangka pengelolaan dan pelestarian ekosistem mangrove;
 - g. Mensosialisasikan ketentuan-ketentuan dan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pengelolaan ekosistem mangrove kepada masyarakat;
 - h. Melaporkan dan bertanggung jawab atas hasil kegiatan kelompok kerja kepada Gubernur.

17

PENINGKATAN PERAN & FUNGSI KKMD

Dengan mengacu pada Strategi yang ada di SNPEM (Strategi Bid. Kelembagaan & Bid. Peraturan), KKMD yang anggotanya terdiri dari wakil SKPD dapat mengambil peran :

1. Sinergi dengan BKPRD (Badan Koord Penataan Ruang Daerah), untuk mengintegrasikan kebijakan ruang penyelamatan ekosistem mangrove.
2. Koordinasi dengan Tim Penyusun RPJPD/RPJMD untuk mengawal program prioritas penyelamatan ekosistem mangrove.
3. Penguatan baseline data mangrove di masing2 daerah.
4. Penguatan baseline data isu permasalahan terkait ekosistem mangrove.

SALAH SATU INSTRUMEN : KLHS

18

KELEMBAGAAN YG ADA

- o Beberapa kelembagaan yang terkait dengan pengelolaan mangrove:
 1. BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah)
 2. KKMD ('lex spesialis')
 3. Forum DAS
 4. Dewan Sumber Daya Air Daerah

Anggota KKMD yg terdiri dari wakil SKPD & pakar/masyarakat dapat lebih banyak berperan aktif memperjuangkan ekosistem mangrove dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah melalui Forum SKPD maupun Musrenbang.

KKMD dapat mendorong model penerapan kelembagaan masyarakat melalui dukungan pembangunan, pembinaan dan pengawasan.

18

KEWENANGAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN MANGROVE MENURUT PP 38/2007 (1)

SUB BID.	PEMERINTAH	PROV	KAB./KOTA
30. Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove	<p>Penyusunan dan penetapan rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/sub DAS.</p> <p>Penetapan rencana pengelolaan rehabilitasi hutan, rencana tahunan dan anggaran tahunan dan anggaran rehabilitasi hutan pada hutan konservasi kecuali cagar alam dan zona lindung nasional.</p>	<p>Perencanaan hutan rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/sub DAS.</p> <p>Penetapan rencana pengelolaan rehabilitasi hutan, rencana tahunan dan anggaran tahunan untuk rehabilitasi hutan pada hutan konservasi yang tidak termasuk zona lindung nasional.</p> <p>Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan anggaran rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak termasuk zona lindung nasional/pengelolaan hutan dan lahan di luar kawasan hutan skala provinsi.</p>	<p>Perencanaan hutan rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/sub DAS.</p> <p>Penetapan rencana pengelolaan rehabilitasi hutan, rencana tahunan dan anggaran tahunan untuk rehabilitasi hutan pada hutan konservasi, hutan produksi, hutan lindung yang tidak termasuk zona lindung nasional/pengelolaan hutan dan lahan di luar kawasan hutan skala kabupaten/kota.</p>

20

**KEWENANGAN DAERAH DALAM
PENGELOLAAN MANGROVE MENURUT PP
38/2007 (2)**

SUB BID.	PEMERINTAH	PROV	KAB./KOTA
42. Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove	Pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan konservasi kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional.	<p>Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya skala provinsi.</p> <p>Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan, dan lahan di luar kawasan hutan skala provinsi.</p>	<p>Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya skala kabupaten/kota</p> <p>Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan, dan lahan di luar kawasan hutan skala kabupaten/kota.</p>

YANG TELAH DILAKUKAN OLEH DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR, LAUT DAN PULAU-PULAU KECIL

1. Permendagri No. 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya di Wilayah Laut, yang mencakup Perencanaan, Pengelolaan, Pemberdayaan Masyarakat, Peran Serta Masyarakat, Pendanaan, Pembinaan dan Pengawasan.
2. Dana Dekonsentrasi (2012) untuk penguatan kelembagaan dalam pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil 9 provinsi yang telah merintis kerjasama antar provinsi di kawasan :
 - Selat Karimata : Kalimantan Barat, Jambi, Kep. Bangka Belitung, dan Kep. Riau
 - Teluk Tomini : Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo
 - Teluk Bone : Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara
3. Dana dekonsentrasi (2013) untuk penguatan kelembagaan di 15 provinsi termasuk Provinsi Jawa Tengah.

LOKASI KEGIATAN DEKONSENTRASI

Penguatan Kelembagaan Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Pesisir, Laut Dan Pulau-Pulau Kecil

1. KALIMANTAN BARAT
2. KEPULAUAN RIAU
3. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
4. JAMBI
5. SULAWESI UTARA
6. SULAWESI TENGAH
7. GORONTALO
8. SULAWESI TENGGARA
9. SULAWESI SELATAN
10. NUSA TENGGARA BARAT
11. NUSA TENGGARA TIMUR
12. MALUKU
13. MALUKU UTARA
14. LAMPUNG
15. JAWA TENGAH

TA 2012

TA 2013

23

KESIMPULAN REKOMENDASI

- o KKMD dapat berperan lebih besar dalam menjaga dan mengembangkan ekosistem mangrove melalui kelembagaan di daerah dan dukungan KKMN.
- o KKMD perlu segera menjabarkan strategi nasional ke dalam rencana aksi dan mengintegrasikannya ke dalam RPJPD dan program RPJMD-nya.
- o Pemda perlu menyusun Rencana Rinci Tata Ruang (RTR Kawasan Strategis/ RDTR Kawasan Pesisir) atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir sebagai bagian dari instrumen pengaturan ruang dan tata kelola wilayah pesisir.
- o Pemda perlu melaksanakan KLHS dalam penyusunan/evaluasi RPJPD, RPJMD, dan RTRW beserta rencana rincinya, dalam rangka upaya menjamin eksistensi ekosistem mangrove secara berkelanjutan.
- o KKMD berinisiatif melakukan upaya penguatan kelembagaan masyarakat *in situ* dalam menjaga kelestarian mangrove.

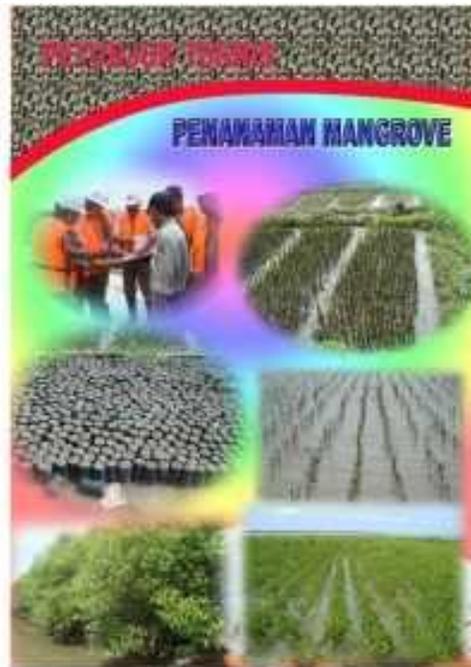
24

Terima Kasih.....



IV. Diskusi Kelompok

a. Struktur-lunak (Soft-structure) untuk Rehabilitasi Wilayah Pesisir



Mengenal wilayah mangrove secara umum



**MANGROVE DI DUSUN PAGEGEN, PAMEKASAN TANAM
2007, JUMLAH BIBIT TERTANAM 120.000 BT
PERHATIKAN LATAR BELAKANG**

KONDISI AWAL TANAM



UMUR 2 TAHUN



Hal-3

**MANGROVE DI PAGEGEN PAMEKASAN TANAM 2007
PERHATIKAN LATAR BELAKANG**

KONDISI UMUR 1 TH



UMUR 3 TAHUN



Hal-4

**NAMPAK PENANAMAN YG GAGAL
DI LUMPUR LAPINDO Tanam awal 2009**



PENANAMAN DI LUMPUR LAPINDO/ BPLS T
Tanam 2010 , Jumlah tertanam 140.000 bt umur 6 bulan



Hal-6

MANGROVE DI LUMPUR LAPINDO JENIS API - API
(PENANAMAN JANUARI 2010)

Awal tanam jenis Api - api

Kondisi umur 8 bln



Hal-7

CEMARA UDANG
(Desa Tempusari Kec. Tempurejo Kab. Lumajang)



Penanaman Nopember 2010 pengambilan gambar Mei 2011 TERTANAM 4.000 BT Keberhasilan 100 % Dari target

Hal-8

HUTAN API – API & TINJANG

Penanaman di Surabaya Barat
Umur 4 Th oleh LH provinsi jatim



Hutan tinjang di Madura



Hal-9

Perhatikan latar belakang, bertanyalah dengan keberadaan penanaman?

Penanaman di Surabaya Barat tahun 2005

AWAL PENANAMAN



UMUR 3 TAHUN



Hal-10

PENANAMAN DI KALISARI SURABAYA TIMUR

UMUR 1 TAHUN



**UMUR 2 TAHUN PERHATIAN
LATAR BELAKANG**



Hal-11

Perbandingan awal Tanam & umur 2 tahun Jenis
avecenia di Desa Segoro Tambak Sedati Sidoarjo

Awal tanam Segoro tambak



Umur 2 tahun Segoro tambak



Hal-12

**LAPORAN PENANAMAN MAGROVE KKP PUSAT
DAN DKP PROVINSI DI JAWA TIMUR**

TERTANAM LEBIH DARI 1 JUTA POHON BAIK
MANGROVE SEJATI MAUPUN MANGROVE
ASOSIASI, DARI TAHUN 2005 S/D 2012
KEHIDUPAN TANAMAN RATA – RATA 80 – 95 %
JIKA DIBANDINGKAN TARGET MAKA KEHIDUPAN
LEBIH DARI 100 %



Hal-13

b. Struktur-fisik (Hard-structure) untuk Rehabilitasi Wilayah Pesisir



METODE REHABILITASI WILAYAH PESISIR

- o Hard Structure
- o Soft Structure
- o Kombinasi
- o Meskipun dengan hard structure harus dilakukan dengan ramah lingkungan

→ **Kombinasi**

Hal-3

JENIS HARD STRUCTURE

- o Disesuaikan dengan kondisi setempat

Contoh :

Di Pekalongan dengan litologi pasir ditangani dengan Geotube (lahan pasir yang tertangkap dibelakangnya ditanami dengan cemara laut)

Di Demak dengan litologi lempung ditangani dengan Breakwater (dibelakangnya dipasang terucuk untuk membuat lahan timbul dan ditanami mangrove)

Hal-4

KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN KERUSAKAN PANTAI

- Harus dimulai dengan perencanaan dan monitoring
- Sebaiknya ada kelembagaan yang jelas untuk menangani wilayah pesisir mengadopsi konsep Tim Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Sungai (TKPSDA Sungai...)
- Pemberdayaan masyarakat untuk menanam, memelihara, serta mengambil manfaat secara langsung dari ekosistem yang telah direhabilitasi (silvofishery, mina bakau)

Hal-5

KOORDINASI TINGKAT PUSAT DAN DAERAH

- Tingkat Pusat harus membuat kebijakan penanganan kerusakan wilayah pesisir secara menyeluruh dan harus di patuhi oleh daerah secara bersama-sama → kesamaan persepsi tentang penangan kerusakan
- Koordinasi antara SKPD

Hal-6

KOMPENSASI PELAKU PEMBANGUNAN BANGUNAN PANTAI

- o Monitoring secara terus-menerus pasca pembangunan
- o Memberikan kompensasi berupa perbaikan kerusakan pantai akibat bangunan yang dibuat

Hal-7



c. Regulasi dan Kelembagaan untuk Pengelolaan Rehabilitasi Wilayah Pesisir

REGULASI & KELEMBAGAAN

Semarang, 10 Oktober 2012

Page-1

PERMASALAHAN

1. Adanya kepentingan baik dari instansi pemerintah dan swasta, sehingga dalam pengelolaan kawasan pesisir tidak dapat berjalan dengan baik
2. Belum adanya desain perencanaan yang matang atau kesalahan dalam membuat rancangan kebijakan tanpa melihat dampak yang akan terjadi
3. kurang adanya penyuluhan kepada masyarakat pesisir dalam pengelolaan wilayah pesisir

Page-2

Lanjutan..

4. Status kepemilikan dan pemanfaatan lahan yang tidak jelas di wilayah pesisir
5. Kebijakan Anggaran yang tidak jelas untuk pengelolaan pesisir
6. Kebijakan yang tidak dapat diterapkan di semua lokasi
(contoh: Keppres No. 32 tahun 1990 tentang pengaturan sempadan pantai 130x rata-rata pasang surut yang tidak dapat diterapkan di seluruh wilayah di pesisir Indonesia)
7. Terkait Isu Hulu dan Hilir

Page-3

REKOMENDASI

1. mengundang semua yang terkait dengan pesisir (perusahaan), yang nantinya melalui program CSR perusahaan yang akan diarahkan kearah pesisir.
2. Bahwa peta-peta detail yang sudah akan dihasilkan oleh BIG sebaiknya harus di sosialisasikan ke pihak swasta, pemerintahan dan stakeholders yang terkait

Page-4

Lanjutan..

3. dalam menentukan kebijakan, harus ada keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pesisir khususnya mangrove.
4. Pelibatan Perguruan tinggi terdekat untuk melakukan program-program kegiatan di masyarakat di wilayah pesisir
5. Dapat melibatkan lembaga kemahasiswaan untuk membantu masyarakat dalam melakukan kegiatan di lapangan

Page-5

Lanjutan..

6. Semua regulasi yang dibuat di daerah harus dibuat oleh orang yang memahami dan tau tentang kondisi mangrove dan pesisir (dalam menyusun kebijakan harus orang yang benar benar mengerti / ahli dan tau)
7. Dalam penerapan kebijakan tidak ada tawar menawar harus ditegakkan dengan tegas dan sosialisasikan dengan baik

Page-6

Lanjutan..

8. Perlu menciptakan dan mempertahankan Kearifan local.
9. BPDAS mengaktifkan dan melibatkan forum DAS terkait isu hilir dan hulu (Untuk wadah dan mensikronkan beberapa kebijaksanaan)
10. KLH Membuat model-model untuk mensinergiskan hulu dan hilir yang nanti diharapkan dapat di manfaatkan dengan baik di daerah daerah.

Page-7

Lanjutan..

12. ABRI MASUK MANGROVE
- ▶ Militer ikut merehabilitasi dalam hutan mangrove.
 - ▶ BPDAS BS menjajaki kerjasama formal dengan TNI dalam rangka rehabilitasi Pesisir

Page-8

V. Rumusan sebagai Rekomendasi dari hasil Kegiatan Seminar Nasional

Ada tujuh (7) point yang menjadi bahan rekomendasi yang dibuat oleh NCB Indonesia, antara lain:

1. Pengelolaan pesisir merupakan kegiatan lintas sektor yang melibatkan beberapa K/L, pemerintah daerah dan masyarakat. Saat ini penanganan kerusakan pesisir di utara Jawa yang saat ini masih dilakukan secara sendiri-sendiri atau terpisah Oleh karena itu diperlukan penanganan secara terpadu, sinergi antar sector (K/L)
2. Beberapa kebijakan yang dapat dijadikan acuan dalam pengelolaan pesisir antara lain: (1) UU No 17 tahun 2007 tentang RPJP 2005-2025 yang menjabarkan misi ke 7 Indonesia sebagai negara kepulauan yang maju dan mandiri, yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan lima tahun dan tahunan; (2) Undang-undang No. 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil dapat dipergunakan sebagai landasan adaptasi pengelolaan wilayah pesisir berkelanjutan untuk penanganan kerusakan pantura Jawa; (3) UU 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup; (4) PP No 76/2008 yang mengamatkan adanya perencanaan pengelolaan mangrove; (5) UU No.7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang menekankan pentingnya konservasi sumber daya air dan pengendalian daya rusak air. Peraturan perundangan tersebut di atas perlu diharmonisasikan dalam implementasinya.
3. Pengelolaan ekosistem mangrove harus dilakukan secara terpadu melalui rencana tata ruang, rencana pembangunan wilayah pesisir dan kelembagaannya.
4. Beberapa langkah strategi yang dapat dilakukan untuk mengelola pesisir terpadu agar kerusakan dapat diminimalisir adalah :
 - a. Koordinasi lintas sektor dan pusat-daerah. Koordinasi ini perlu diperkuat dengan peningkatan kesadaran dan komitmen dari semua pemnagku kepentingan.
 - b. Penyusunan rencana aksi (*action plan*) yang implementasinya dilakukan secara bersama. Dalam rencana aksi tersebut perlu jelas jenis kegiatan, anggaran, penanggung jawab, serta tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan kewenangan pusat-daerah.
 - c. Penetapan daerah prioritas untuk segera dilakukan penanganan bersama. Untuk uji coba keterpaduan penanganan pantura Jawa perlu disepakati daerah prioritas yang ditangani secara bersama dan diusulkan kegiatan perbaikan lingkungan pesisir di Kabupaten Demak dan Kabupaten Kerawang.
 - d. Koordinasi data yang sudah ada di masing-masing K/L. Selain itu diperlukan kesepahaman dan kesamaan atas data yang ada.
5. Untuk pengembangan vegetasi mangrove:
 - a. Diperlukan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang pentingnya peran mangrove bagi kehidupan. Pemberdayaan masyarkat juga perlu dilakukan agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam penanaman/pemeliharaan mangrove.
 - b. Skema pendanaan pengelolaan mangrove dapat dilakukan melalui pendanaan dari APBN, APBD dan juga CSR.

- c. Memperhatikan persyaratan teknis terkait antara lain: identifikasi kondisi dan status lahan, ekologi, waktu tanam, musim, sumber air, pasang surut air laut, dan jenis mangrove (api-api atau rhizopora). Pendekatan secara sosial juga perlu dilakukan.
 - d. Pembangunan soft structure (penanaman mangrove) perlu memperhatikan spesifik lokasi (micro site) sehingga tidak dapat digeneralisasi.
6. Untuk pengembangan struktur buatan manusia maka diperlukan:
 - a. Dilakukan dengan ramah lingkungan
 - b. Pemilihan teknologi yang tepat mengikuti karakteristik wilayah, sebagai contoh daerah yang berpasir menggunakan teknologi geotube atau groin permeable. Untuk daerah yang berlempung atau lumpur menggunakan kombinasi breakwater dan tanah tinggi untuk mangrove
 - c. Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap (mulai dari perencanaan sampai dengan monitoring-evaluasi). Oleh karena itu diperlukan kelembagaan khusus yang menangani (dapat mengadopsi konsep TKPSDA Sungai).
 - d. Perlunya kesamaan persepsi tentang penanganan kerusakan pantai.
 - e. Kompensasi dari pelaku pembangunan bangunan pantai kepada yang terkena dampak.
7. Untuk pengembangan kelembagaan direkomendasikan :
 - a. Perlu dilakukan sinergi antar kelembagaan yang menanam mangrove untuk penanganan kerusakan pesisir dan dipetakan
 - b. Pelibatan masyarakat dalam perencanaan penanganan kerusakan Pantura
 - c. Pelibatan perguruan tinggi, ABRI, dan penyuluh
 - d. Ketegasan dalam penerapan kebijakan dan dilakukan sosialisasi
 - e. Keterpaduan pengelolaan tata air antara daerah hulu dan hilir untuk mengurangi dampak kerusakan di wilayah pesisir Pantura
 - f. Memperhatikan kearifan lokal yg telah berhasil dalam pengelolaan wilayah pesisir/pantura.

VI. Lampiran

1. Agenda Seminar Nasional

Waktu	Agenda	Keterangan
08.00 – 08.30	Daftar Ulang	Panitia
08.30 – 09.00	Pembukaan Direktur Kelautan dan Perikanan, Bappenas (Ketua NCB Indonesia)	Dr. Ir. Sri Yanti Wibisana
	Direktur Pesisir dan Lautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan “Regulasi dan Kebijakan Rehabilitasi Wilayah Pesisir”	Ir. M. Eko Rudianto, M.Bus, IT
09.00 – 09.15	Rehat	Panitia
09.15 – 11.00	Implementasi Pengelolaan Wilayah Pesisir Pantura Jawa	Prof. Sukristijono (Moderator)
	Regulasi dan Implementasi Rehabilitasi Hutan Mangrove	Direktur Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kementerian Kehutanan
	Standar Kriteria Kerusakan Pesisir dan Upaya Pelestarian Wilayah Pesisir Pantura Jawa.	Asisten Deputi Urusan Pengendalian Kerusakan Pesisir dan Laut, Kementerian Lingkungan Hidup
	Implementasi dan Regulasi Mencegah Kerusakan Pantura Jawa	Direktur Sungai dan Pantai, Kementerian Pekerjaan Umum
	Pemetaan Status dan Kerusakan Wilayah Pesisir Pantura Jawa, studi kasus di Jawa Tengah.	Dr. Rudhi Pribadi (Universitas Diponegoro)
	Peran Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) dalam Mendorong Percepatan Pengelolaan Wilayah Pesisir Berkelanjutan	Direktur Fasilitas Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri
11.00 – 12.00	Diskusi	Moderator: Prof. Sukristijono
12.00 – 13.00	Ishoma	Panitia
13.00 – 13.15	Pengantar untuk Diskusi Kelompok	Kementerian Kelautan dan Perikanan
13.15 – 14.30	Diskusi Kelompok	
	a) Struktur-lunak (Soft-structure) untuk Rehabilitasi Wilayah Pesisir	Rudhi Pribadi (Universitas Diponegoro)
	b) Struktur-fisik (Hard-structure) untuk Rehabilitasi Wilayah Pesisir	Sugeng Widodo (Universitas Diponegoro)
	c) Regulasi dan Kelembagaan untuk Pengelolaan Rehabilitasi Wilayah Pesisir	Nyoman Suryadiputra (Wetlands Indonesia)
14.30 – 14.45	Rehat	Panitia
14.45 – 15.30	Presentasi kelompok	Kementerian Kelautan dan Perikanan
15.30 – 16.00	Rekomendasi Hasil Seminar	Bappenas
16.00 – 16.30	Penutupan	Ketua NCB Indonesia

2. Daftar Peserta Seminar Nasional

No	Nama	Instansi	Email	Telpone/HP
1	S. Sukardjo	LIPI- NCB		
2	Andi Pamungkas	Ditjen SDA PU		
3	Murdoko	BPHM I Bali		
4	Wawan Ridwan	WWF Indonesia		
5	Aris Wibowo	Dit PL KP3K		
6	M. Mazid	Dit Sungai dan Pantai		
7	Chrisna A.S	UNDIP		
8	Nyoman SP	WIIP		
9	Nursiwan Taqim	Asdep 3/III - KLH		
10	Diah Indrajati	Ditjen Bangda		
11	Peni Rahayu	Dishut Prov Jateng		
12	Heru P	Bappeda Kab.Pekalongan		
13	Luthfia Zahra Zen	Wetlands		
14	Dinar Savitri	BPLHD Prov DKI		
15	Wawan K	Kelautan DKI		
16	Muh Ichsan	DKP Prov Jatim		
17	Iwan Kurniawan	UNDP		
18	Giffari	Bappeda DKI		
19	Kusumo Widodo	BIG		
20	Bambang Suprakto	AP Sidoardjo BPSDMKP		
21	Elin Shinta	UNDP		
22	Roby Fadillah	Bappenas		
23	Setyawati	Bappenas		
24	Irwan Budiarto	BBWS Cimanuk-Cisanggaring		
25	Betty D	Bappeda Kota Pekalongan		
26	Chika A Gionika	UNTAG SMG		
27	Yurianto	Kemenhut		
28	Haris Mazakhy	LPPSP Semarang		
29	Udaharipantjoro	BLH Prov Jatim		
30	Winda Agustiri	BBWS B.Solo		
31	Riyadi	Bappeda Kab Smg		
32	Sumarsono Hadi	Bappeda Kab Pati		
33	Dyah Ismu	Dinhut Prov Jateng		
34	Sukirin	Dinhut Jateng		
35	Himawan	Bappeda Jateng		
36	Suhartono	DKPP Kab Tegal		
37	Nur Hidayat	Dinas PSDA Prov JT		
38	Ir. Budi Adi Slamet	Untag SMG		
39	Wahyu Setianto	BBWS Brantas		

40	M. Eko Rudianto	KKP		
41	Indreswari	Bappeda Kab Kendal		
42	Mahmud	LPPSP Semarang		
43	Hardianto	BPDAS JT		
44	Andi Purnomo	Arsitektur Unnes		
45	Hetyorini	Aris Untag		
46	Heru Setiabudi	Bappeda Demak		
47	Nirwani	FPIK UNDIP		
48	Candra H	DPPK Kota Pekalongan		
49	Tri Apriyadi	Yayasan Damar		
50	Aditya Yuniarti	KLH Jakarta		
51	Niharul Annas	Kesemat		
52	Khumaedi	Yayasan Mangrove		
53	Retno Hartati	FPIK - UNDIP SGF		
54	Tangguh Gilang P.W	Kesemat		
55	Karsiadi Yulianto	Bappeda Purworedjo		
56	Suseno Wangsit Wijaya	BIG		
57	Ambariyanto	FPIK		
58	Sri Utami	Kridawana Lestari		
59	Yuvita Reni	Kridawana Lestari		
60	Steen Christensen	MFF		
61	Suharyanto	Bapeeda Batang		
62	Arif Tantriadi	UNDIP/FPIK		
63	Person Pesona R	UNDIP/MSDP		
64	Bayu Kreshna Adhitya	UNDIP/MSDP		
65	Moch Sartono	Fak Teknik Untag Semarang		
66	Ansgarius Pape	Fisip UNTAG		
67	Aditano YR	MSDP / UNDIP		
68	A Solihin	fpik IPB		
69	Eko Prio N	DKP KENDAL		
70	Frista	KKP		
71	Purwanto	FPIK UNDIP		
72	Nur Hasnih	BPDAS JT		
73	Aklif Reza	FPIK UNDIP		
74	Heru Dinmika	Dishut Jateng		
75	M Sahlan	KT. MITRA BAHARI		
76	Mukhamad Leo	Bappeda Kab. Pemalang		
77	Denny Nugroho	FPIK UNDIP		
78	Sudiyanso	Pelindo III		
79	Agus Tri S	Pelindo III		
80	Achmad S	Dislutkan		

81	M Dian Satriadi	DKP Jepara		
82	Ahmad Solihin	Bappeda Prov Jateng		
83	Awon Prabowo	Disutkan Pati		
84	Takahisa Kusano	MECS-JICA		
85	Sri Yanti	Bappenas		
86	Sukamto	Media KORPRI		
87	Yudhi Amiral	KKP		
88	Hidayati Utami	BPDAS		
89	Agus Subagyo	DISNAKKAN		
90	Roufadima	UNTAG SMG		
91	Agustina Dwi R	UNTAG SMG		
92	Detinus Sani	UNTAG SMG		
93	Dini Mandrianawati	BBWS		
94	Ir. M Furqon A	BPPDA		
95	Barkah S	Bangda		
96	Soesno Diono	Kemenhut		
97	Rini Budi Hastuti	UNDIP		
98	Endah Dwi Hastuti	UNDIP		
99	Komar	BPDAS		
100	Agus Indarjo	FPIK UNDIP		
101	Nanang F Sudrajat	BPDAS		
102	Bejo Santosa	Dir BRHL		
103	Riche Maya Hapsari	UNTAG SMG		
104	Ni Made Ernawati	MSDP / UNDIP		
105	Tubagus Syahrur Ridho	MSDP / UNDIP		
106	Siky Handini W	DKP Kota Semarang		
107	Nana Kanada	Unnes Semarang		
108	Dyah Shanti K	DKP Prov Jateng		
109	A Fadillah	Roren KKP		
110	Bonny P Tambunan	Roren KKP		
111	Agustinus Tenawe	Fisip UNTAG		
112	Rifki Maolana	Fisip UNTAG		
113	Zaenal AB	Bappeda BBS		
114	Safrhoia	KKMD Jateng		
115	Dasminto	Kementerian LH		
116	Rika Novida	JICA-MECS		
117	A Rochi	BBWS J		
118	Tommy Hermawan	Bappenas		
119	Suwarno	Bappenas		
120	Dudy Nugroho	MFF Indonesia		
121	Weka Mahardi	KKP		

122	Dimas Adiyaksa	KKP		
123	Elvita Nezon	KKP		
124	Fajar Renita	KKP		
125	Komar	Kemenhut		
126	Rudhi Pribadi	FPIK-UNDIP		

3. Notulensi Seminar Nasional

A. Notulensi Hasil Seminar

1. Dr. Ir. Sri Yanti Wibisana – Director of Marine and Fisheries, BAPPENAS/NCB Chair

- Fenomena perubahan iklim menjadi isu utama sesuai dengan amanat Presiden SBY dalam RAN GRK; menerapkan RPJMN Misi ke-6 dan ke-7 → mendudukkan porsi pembangunan berbasis kepulauan, saat ini focus pembangunan di kawasan terestrial.
- Pembangunan kawasan pesisir harus dilakukan dengan pendekatan multi-sektor. Pendekatan lintas sector diupayakan dalam Pengembangan wilayah. Tantangan mengurangi dampak kerusakan di daerah pesisir, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di wilayah pesisir (lebih dari 60%). Kelompok ini juga rentan terhadap dampak perubahan iklim.
- ATM, Program 1 Milyar Pohon dan MFF merupakan contoh initiative untuk merehabilitasi mangrove. Penanganan dampak CC tidak hanya dalam bentuk bangunan fisik tetapi dapat didekati dengan 'green belt' melalui penanaman mangrove.
- Keterpaduan ada 3: Rencana penataan ruang; rencana pembanguna wilayah pesisir; pengelolaan wilayah ekosistem secara terpada melibatkan masyarakat dan lembaga.
- Ada 13 K/L terkait. Aspek regulasi dan kebijakan perlu disinergikan lintas sector, meninggalkan ego sektoral termasuk dalam kegiatan monitoring dan evaluasi.
- Prioritas pertama pemanfaatan ekosistem mangrove: mengamankan kawasan mangrove yang masih utuh (data dan informasi penting/baseline) → penyelarasan data baseline mangrove (kawasan, laju kerusakan masih berbeda-beda antar K/L); rehabilitasi kawasan yang rusak secara terintegrasi; meningkatkan mutu kawasan mangrove terkait visi mensejahterakan masyarakat, khususnya di wilayah pesisir.
- Perlu kombinasi top-down dan bottom-up dalam pengelolaan pesisir terpadu sesuai dengan STRANAS.
- Target seminar: menghimpun, mengidentifikasi permasalahan kawasan pesisir dan merusmuskan upaya penanggulangannya.

2. Ir. M. Eko Rudianto, M. Bus, IT. – Direktur Pesisir dan Lautan, KKP

- Regulasi dan Kebijakan Rehabilitasi Kawasan Pesisir
- Kerusakan pantai banyak terjadi di pantura karena alam dan akibat kegiatan manusia. Seminar bangunan pantai telah dilakukan untuk mengelola garis pantai dari kerusakan.
- Anggaran pengelolaan kawasan pesisir tersebar, alokasi untuk KKP kecil. Perlu koordinasi denga K/L terkait khususnya PU dan Kemenhut.

- Dampak negative pembangunan di wilayah pesisir: local stresser ditambah dengan CC akan besar pengaruhnya. Local stresser dapat ditangani.
- Local stresser: factor manusia, misalnya bangunan pantai untuk kebutuhan tertentu maupun pengaman menimbulkan dampak negative terhadap garis pantai. Faktor lain misalnya penambangan pasir dll.
- Bangunan pantai : jika dibangun tegak lurus akan menimbulkan sedimentasi dan erosi di tempat lain. Yang berhasil baru di Australia dengan memindahkan sedimentasi ke daerah yang terkena erosi dengan volume yang sama.
- Faktor 2: sedimentasi, kegiatan di hulu/daratan akan mengalir ke pantai.
- Data abrasi dan akresi di Banten; Jawa Barat, Jatim.
- Kerusakan terjadi di 166 titik = 500 km di 20 propinsi, mengancam pemukiman, infrastruktur kelautan dan perikanan, fasilitas wisata, tambak/sawah, jalan raya.
- Di Kendal, sudah terjadi abrasi kurang lebih 2 km. Di Demak, rehabilitasi mangrove sendirian tidak mampu mengatasi abrasi. Kasus di Karawang juga tidak efektif karena jumlah bibit yang ditanam masih terbatas menyebabkan 20 ha lahan hilang.
- Luas mangrove menurut Bakosurtanal:
- Bagaimana upaya mengatasi?
- UU No 27/2007 Struktur pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil – ada kawasan konservasi dan kawasan pemanfaatan umum.
- Pemanfaatan yang berkelanjutan: pentaan ruang, memberdayakan masyarakat
- Kegiatan untuk mengurangi dampak
- Amanat rehabilitasi untuk kawasan yang rusak, dilakukan oleh berbagai pihak. Urgensinya menjaga eksistensi sumberdaya 60% produksi ikan berasal dari kawasan mangrove (pemijahan dll).
- Upaya pencegahan: soft structure (zonasi.tata ruang) → regulasi untuk membangun sempadan pantai. Hard structure melalui penguatan (bangunan) pantai untuk mengurangi ombak.
- 2 Km APO sudah dibangun di Mangunharjo Semarang yang melindungi kawasan mangrove di dalamnya. Bekerja sama dengan BLHD Semarang.
- Rehabilitasi mangrove dilakukan oleh semua Negara.
- Peran K/L dalam mengatasi kerusakan Pantura (table)
 1. Meningkatkan koordinasi lintas sector
 2. Penetapan lokasi prioritas untuk ditangani, misal Demak dan Karawang dalam 5 tahun ke depan; bagaimana dengan sharing anggaran dari masing-masing K/L.
 3. Implementasi SNPEM.
 4. Mendorong peningkatan anggaran untuk mengatasi kerusakan. PU dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan APO.
 5. Perpres Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional ditanda-tangani melalui fasilitasi KKMN. Apa langkah selanjutnya?
 6. Membuat kebijakan yang dapat diimplementasikan bersama (lintas sector) supaya dampak kerusakan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dapat diminimasi, terutama untuk menjaga garis pantai.
 7. Melahirkan action plan untuk 2013 lengkap dengan anggaran, penanggung jawab dan jenis kegiatan.

Paparan Panel/pleno

1. Direktur Bina RHL Kemenhut – Bejo (Regulasi dan Implementasi Pengelolaan Hutan Mangrove di Indonesia)

- Mangrove vs kawasan mangrove vs hutan mangrove: masih ada perbedaan luas hutan mangrove, belum ada data yang akurat. Slide kondisi mangrove
- Terluas di Asia: 2006 seluas 7.7 juta ha namun belum dimanfaatkan secara optimal.
- Keppres No 32/1990. Mangrove termasuk dalam kawasan lindung, pasal 14 kriteria sempadan sungai; pasal 27 kriteria kawasan berhutan bakau.
- SNPEM (Stranas) – Agustus 2012 di ttd Presiden.
- Kemenhut menyusun rencana RHL termasuk mangrove. PP 76/2008 perencanaan pengelolaan mangrove.
- Kelembagaan mangrove yang sudah ada: Balai Pengelolaan mangrove (wilayah 1/Barat di Medan dan 2/Timur - Denpasar) di bawah Kemenhut; KKMN; KKMD.
- Implementasi: penyediaan data dan informasi sejak 2006 namun masih ada gap metodologi; PP 76 dan PP 38 ada hierarki perencanaan pengelollan mangrove: (1) Rencana Teknis RHL Mangrove di tiap DAS; (2) Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Mangrove di Kab/kota – baru 50% selesai; (3) Rencana Tahunan RHL Mangrove.
- Kegiatan RHL sudah dilaksanakan 35.000 ha, plus 10.000 setiap tahun mulai 2013 dengan dana APBN dan APBD, DAK Kehutanan, Dana Bagi Hasil Reboisasi.
- Realisasi: 2011 – 2014

2. Nursiwan – Asdep Pengendalian Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut, KLH

Pengendalian Kerusakan

- Tiga ekosistem utama pesisir dan laut: mangrove, padang lamun dan terumbu karang.
- Isu dan permasalahan Wilayah Pesisir (DENR, 2001):
- Pencegahan:
- Perlindungan mutu laut (criteria baku kerusakan lingkungan): terumbu karang, mutu air laut, padang lamun dan mangrove.
- Padan lamun tingkat kerusakan tinggi jika di atas 50%. Dapat ditentukan jika mempunyai baseline data.
- Presentase tutupan terumbu karang yang hidup belum ada data baseline
- Kepmen LH 201/2004: Rusak/Jarang; Baik (sedang/sangat padat).
- Pengaturan Perlindungan terhadap sempadan pantai (Kepres 32/1990)
- Kriteria lingkungan pesisir dan laut
- Lokasi yang perlu dilindungi dari pencemaran/kerusakan
- Naskah akademik telah disiapkan untuk mengusulkan PP tentang mangrove dilanjutkan dengan Permen Perbaikan kondisi mangrove.
- Untuk mengatasi kerusakan pantai, KLH sudah melakukan kordinasi kegiatan LH. Panjang pantai kedua setelah Kanada namun kondisi pantai rata-rata rusak dan terjadi pemiskinan. Ada korelasi positif antara kemiskinan dan kerusakan lingkungan.
- KLH melibatkan masyarakat untuk memperbaiki dengan program **Rantai Emas** (Rehabilitasi Pantai Entaskan Masyarakat Setempat). Ada 18 kelompok difasilitasi untuk rehabilitasi terumbu karang dan mangrove.
 1. Meningkatkan vegetasi dengan jenis tanaman dan teknologi yang tepat)

- 2. Mengurangi abrasi
- 3. Meningkatkan pendapatan masyarakat
- 4. Menggunakan kearifan lokal
- Tindak lanjut penyusunan peraturan pelaksanaan UU No 32/2009. Pengelolaan Pantai secara terpadu di Teluk Tomini, Bali, . Rencana aksi akan disusun sebagai bahan koordinasi di tingkat pusat dan daerah.

3. Moch Mazid, ST, SP. – Kasubdit Wilayah II, Dir Sungai dan Pantai, Ditjen SDA, Kemen PU

- Implementasi dan kebijakan pengamanan Pantura
- Permasalahan pembangunan bidang pengamanan pantai:
 1. Indonesia 17.508 pulau
 2. Garis pantai Bali 436.5 km mengalami abrasi (20.8%); Sayung Demak
- Fenomena perubahan iklim, percepatan pertumbuhan penduduk di wilayah pesisir, penurunan permukaan tanah, kerentanan
- Kebijakan: tidak melakukan investasi baru pada daerah-daerah rawan bencana; tidak melakukan apa2 pada lokasi yang rusak dan tidak ada yang penting untuk dilindungi; relokasi penduduk dari aspek ekonomi menimbulkan kerugian, perlu koordinasi; membangun bangunan pantai; penanaman bakau.
- Tujuan pengamanan pantai: abrasi, rob, stabilitas muara untuk mendukung lalu lintas navigasi, mendukung revitalisasi kawasan pantai yang dilaksanakan secara sinergi dengan sector lain.
- UU no 7/2004 tentang SDA: Konservasi SDA, pengendalian daya rusak air
- PP No 42/2008 Pengelolaan SDA: proses perencanaan, implementasi, M&E, pengendalian daya rusak air (pencegahan, penanggulangan dan pemulihan)
- Pedoman pemulihan pantai Permen PU No 9
- Kondisi Pantura: Jakut-Jabar terjadi penurunan tanah, dst.
- Strategi ke depan: di Jakarta akan dibangun tanggul laut, penampungan air di darat. Ada beberapa tahapan.
- Pengamanan Pantai di Semarang: Rob (tidal Inundation)
- Desa Benda, Pantai Krangkeng, Indramayu.
- Banjir kanal barat Semarang : perbaikan dan peningkatan fungsi yang memperhatikan nilai estetika, membangun kolam retensi 6 ha untuk memompa air ke laut.

4. Indrajati – Direktorat Fasilitasi Penataan Ruang

- Latar belakang pembentukan KKMN, dibentuk 2006 sebagai salah satu upaya untuk penguatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sector/lembaga dalam pengelolaan ekosistem mangrove.
- Tugas KKMN: Lampiran Stranas (Perpres No 73/2012) dengan Permenhut.
- Ekosistem mangrove perlu dimasukkan dalam rencana tata ruang.
- Peran KKMD dalam percepatan RHL Mangrove: sinkronisasi rencana tata ruang dan pembangunan menjadi tantangan untuk pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.
- Visi RPJPD (20 tahun) dan RPJMD (5 tahun) sangat besar gap-nya, berbasis proyek. Pola pemukiman daerah merujuk pada Permendagri yang rigid programnya. Padahal daerah dapat mengusulkan kegiatan/program sesuai dengan kebutuhan local.

- Masalah lain, belum diintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam rencana tata ruang dan rencana pembangunan: saling ketergantungan, keseimbangan aspek sosbud dan keadilan antar generasi dan kelompok2 tertentu. Kemiskinan is heritage problem.
- RPJPD: keterhubungan antar periode tidak konsisten.
- Terdapat hubungan kuat antara RPJPD, RPJMD dan RTRWP namun tidak pernah didiskusikan bersama pada saat penyusunan rencana.

4. Rudhi Pribadi – FPIK UNDIP

- Luas area mangrove di Pantura:
- Utamakan rehabilitasi ekologis, misal dengan penanaman mangrove. Ada 8 species di Pantura dan 17 jenis minor serta 33 jenis mangrove asosiasi.
- Enam Langkah rehabilitasi: perencanaan, pengkajian
- Melakukan pendampingan
- Rehabilitasi fisik dengan memperhatikan kaidah2.
- Penetapan kawasan lindung
- Rehabilitasi: perlu dilakukan siapa melakukan apa, koordinasi, harmoni dan sinergi.
- KKMD belum ad adi semua daerah.

Diskusi

1. Dasmito, KLH. Penanaman mangrove banyak dilakukan, namun kita tidak pernah mendesain akan dijadikan apa lokasi yang ditanami. Di Brebes lokasi RHL mangrove sudah bagus dan ada pertanyaan akan diapakan mangrove yang sudah tumbuh. Prioritas perlu didesain, misal untuk wisata mangrove sesuai dengan zonasi plan. Demikian juga yang terjadi di Pemalang. Masyarakat mengusulkan wisata mangrove, jalur wisata akhirnya ditebang karena tidak direncanakan dari awal. Direct impact/nilai ekonomi dari mangrove dipertanyakan? KKMN = menanam plus. KLH punya program rantai emas. Ada permintaan dari OISCA Jepang (NGO), menanam di Indramayu, Pemalang, Demak, Jepara, Sidoarjo, Banyuwangi, Bangkalan dan Probolinggo. Mangrove yang ditanam dihitung nilai karbonnya dan sebagai kontribusi Jepang untuk penurunan emisi. Akan diadakan seminar hasil kerja OISCA di Surabaya (Nov).
2. Media Korpri – Sukamto.
3. Demografi perlu diinformasikan dalam presentasi pak Rudhi. Rantai Emas juga mengedepankan pendampingan.
4. Nursiwan – dalam RPP akan dimasukkan pentingnya monitoring.
5. Komar Kemenhut – desain sudah dilakukan sebelum penanaman untuk kawasan hutan. RHL di luar kawasan hutan memang belum didesain secara jelas, tidak untuk wisata dan lebih untuk rehabilitasi kerusakan. Namun, asistensi akan dilakukan untuk menyusun desain di lokasi penanaman.
6. Diah Kemendagri – sustainable development sulit dilakukan karena kendala koordinasi antar lembaga terkait. Pada saat Musrenbang, pemetaan stakeholders perlu dilakukan. Kompromi dengan kepala daerah masih berat karena mereka harus memenuhi janji2 kampanye. Tidak ada program terkait dengan rehabilitasi lingkungan. Kita dapat melakukan upaya untuk mendekati misi dan visi pembangunan.
7. Candra – Dinas Perikanan Pekalongan, penurunan produksi 70% perikanan di Pekalongan. Perubahan iklim juga menyebabkan tambak/sawah idle 55%. Apa upaya struktur yang dapat dilakukan. Ada renstra dan perda zonasi serta rencana aksi. Bontang, Indramayu dan Pekalongan

sebagai kota percontohan. Masalah pesisir diperbaiki di kota Pekalongan dan kota/kab tetangga. Perda Sempadan pantai sedang diusulkan, bagaimana mensosialisasikan kepada Kab/kota lainnya rencana aksi. Kemen PU, Rp 2.5 M dialokasikan untuk GeoTube untuk meredam ombak dan menampung sedimentasi. Master plan sudah diintegrasikan dengan ...ada 205 KBR pada tahun 2012. Inisiatif masyarakat juga tinggi, kebutuhan bibit mangrove tidak mencukupi untuk menampung kebutuhan masyarakat.

8. Murdoko - Sungai di Surabaya tercemar limbah industry, demikian jug adi selat Malaka. Untuk Pak Nursiwan, Siapa yang mengontrol kualitas sungai dan buangan limbah? Untuk Pak Rudhi, pemegang ijin diwajibkan merehabilitasi daerah yang rusak sesuai dengan peraturan. Namun jika kawasan tersebut dimiliki individu, hal yang dapat dilakukan adalah menghimbau. Diah – siapa yang mengingatkan jika visi-misi tidak sesuai dengan RPJPD?
9. Rudhi, penanaman sudah banyak dilakukan namun desain tetap perlu dilakukan.

B. Notulensi Hasil Diskusi Kelompok

Kelompok	Notulensi
HASIL DISKUSI SOFT-STRUKTUR	<p>1. Bpk. Murdoko Persyaratan tumbuh mangrove secara ideal :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lahan berlumpur b, Terjangkau pasang surut air laut c. Ombak Kecil d. Air Payau <p>2. Bagaimana kalau persyaratannya hanya 2 atau 3 saja</p> <p>3. Status Lahan</p> <p>4. Jenis tanaman yang cocok dengan lahan</p> <p>2. Bpk. Wawan (Dinas Kelautan dan Pertanian DKI jkt)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi peran, fungsi dan manffat mangrove bagi Masyarakat sekitar 2. Kewajiban pengembang dalam merestorasi kawasan 3. Mengajak CSR dalam upaya perbaikan lingkungan <p>3. Bpk. Dasminto (KLH)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Salah satu teknik pemberdayaan Masyarakat dalam Rehabilitasi Mangrove b. CRS dikaitkan dalam menghasilkan produk <p>4. Bpk. Bambang (APS) Sidoarjo</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Identifikasi wilayah syarat-syarat ekologi, berdasarkan pengalaman syarat tumbuh, substrat tanah, musim gelombang dll, b. Dalam kegiatan rehabilitasi perlu adanya kontrak hidup tanaman sehingga dapat kepastian prosentase tanaman

	<p>c. Ideal penanaman menggunakan biji atau bibit</p> <p>d. Masyarakat perlu diajarkan pembibitan mangrove</p> <p>e. Jenis vegetasi ; yang bisa dimanfaatkan dalam pengolahan makanan berbahan baku buah mangrove</p> <p>f. Pola penanaman mangrove menggunakan system wana mina</p> <p>5. Bp. Sukristiono</p> <p>a. Microsite sedang dikembangkan semua yang telah diutarakan sama pak Bowo tidak bisa digeneralisasikan</p>
<p>HASIL DISKUSI HARD-STRUKTUR</p>	<p>Heru Setiabudi Bappeda Kab. Demak Pantai Demak harus direhabilitasi dengan hard. 100 KK harus pindah dari Desa Bedono. Permasalahan adalah Koordinasi Kementerian/Lembaga tingkat pusat, dan pemerintah daerah. Bangunan pelabuhan di Kota Semarang adalah bangunan massive, setiap pengurangan berdana 10 milyar menyebabkan abrasi. Perlu kompoensasi dari BUMN (Pelindo) dalam hal ini [embuatan groin, sabuk pantai, seperti di Jakarta – yakni dengan adanya breakwater. Solusi : Rumah terapung seperti di San Fransisco. Selain pembangunan fisik diperlukan perkembangan ekonomi local. Bappenas sudah menginisiasi, diperlukan koordinasi SKPD terkait. Tidak boleh berpikir ini adalah penanganan spasial, tp penanganan integrasi.</p> <p>Pemalang, Mitra Bahari Harus melibatkan masyarakat setempat. Jika tidak, hasilnya tidak maksimal. Ada 2 cara rehabilitasi : rehabilitasi dengan fisik dan rehabilitasi dengan vegetative. Secara vegetative tidak haus dengan mangrove, tergantung substrat.</p> <p>Bu Candra- Kota Pekalongan Yang kami butuhkan adalah intervensi dari pusat. Masing-masing walikota (Pemda) memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai pesisir. Pantura haus dikelola secara bersama-sama, selama ini setiap daerah punya visi pembangunan yang berbeda-beda. Dulu kapal yang bisa mendarat di pekalongan 75-100 skrg hanya sekitar 15. Teknolog (Civel teknis)i : Geotube (BBPT) sdh diaplikasi di kota Pekalongan 500m. alternative lain dengan groin yang tidak menimbulkan efek didaerah lain. Untuk daerah yang berlumpur diperlukan break-water dan dibelakangnay dibuat semacam tanah agak tinggi untuk ditanami mangrove. Lekukan2 abrasi diharapkan ditanami mangrove/vegetasi pantai. Sambil diterapkan silvifisheries. Pendanaan dari daerah tidak memungkinkan.</p> <p>Purworedjo Apakah memungkinkan Mina Bakau? (seperti minapadi).</p>

	<p>Pengkajian, prakondisi, dsb.. Perlu ditekankan monev, misalnya patroli mangrove (istilah krida). Libatkan teman2 teman dari keamanan</p> <p>Purwanto (UNDIP) Keterlibatan masy belum optimal. Ke depannya diharapkan masyarakat ikut terlibat dari perencanaan, pelaksanaan, dan bahkan monitoring. Terdapat lembaga formal (TKBSDA) yang terdiri dari komponen pemerintah dan non-pemerintah. Sehingga jika ada rencana pembangunan, dapat lebih mudah dikordinir dengan SKPD terkait. Kajian wilayah pantai dilakukan secara rutin.</p> <p>Pak Heru HP3 dalam UU No 27 Tahun 2007. Perlu direvisi agar nelayan dapat lebih mudah mengakses wilayah pesisir. Hak penguasaan pulau. Perlunya Investasi pulau-pulau.</p> <p>Kridawanalestari Ada beberapa kelompok diversifikasi mangrove yang dapat digunakan untuk rehabilitasi. Heru Demak: Struktur fisik sambil memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat.</p> <p>Pertanyaan seperti apa untuk rehabilitasi ?Jawab peserta KOMBINASI Pak Sugeng : 1. K/L Pusat mengkoordinir 2. Sedimentasi dan abrasi adalah masalah utama</p> <p>Kita buat seperti tanah timbul, ditanami mangrove. Selama masy msh miskin maka akan terus mati</p> <p>Candra : Kota Pekalongan Saya setuju. Ekonomi masy harus diperhatikan. Jika masy salah satu diribit. Kebun2 rakyat (pembibitan) dari kementan perlu disosialisasikan</p> <p>Gilang Kesemat: Pepson UNDIP: Masyarakat perlu dilibatkan krn masy berada langsung di lokasi. Selama ini masy hanya mengejar bayaran. Masyarakat sadar dengan nilai ekonomi dan prospek kedepan dari arti penanaman mangrove.</p>
<p>HASIL DISKUSI REGULASI dan KELEMBAGAAN</p>	<p>1. KELEMBAGAAN Semua orang mengurus mangrove, Adanya wadah dari setiap instansi yang memiliki kepentingan untuk</p>

	<p>mengelola mangrove (kkms, kkmnd) ---tidak bisa optimal karena belum dapat bersinegri dan terkoordinasi dengan baik Contoh: perusahaan di semarang cukup sulit untuk dapat bekerjasama Karena hampir 30% lahan sudah dikuasai oleh perusahaan Rekomendasi—bisa di update ke website (lsm, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, dan instansi pemerintah) Pak Nyoman Swasta kurang dilibatkan karena memang kurang menguntungkan untuk perusahaan Rekomendasi: mengundang semua yang terkait dengan pesisir (perusahaan), yang nantinya melalui program CSR perusahaan diarahkan ke arah pesisir. Bahwa peta-peta detail yang sudah akan dihasilkan oleh BIG sebaiknya harus di sosialisasikan ke pihak swasta, pemerintahan dan stakeholders yang terkait</p> <p>1. Semarang sudah tidak seperti dulu lagi Persoalannya: belum ada desain persncanaan yang matang Ada perencanaan pembangunan yang terkait tta ruang— merancang untuk menahan abrasi (kawasan hijau) Apakah ada kajian yang lebih lanjut untuk menyelesaikan masalah, hanya member desain tetapi tidak memperhitungkan dampaknya. Dalam menentukan desain tanpa melihat dampak yang akan terjadi, sehingga perlu adanya para ahli yang mentukan desain tersebut sehingga tepat pada sasaran Kajian yang kurang komprehensif dalam pengelolaan atau mendesain tata ruang untuk mangrove Rekomendasi: KMKS --- Harus ada keterlibatan masyarakat khususnya bidang mangrove Contoh kasus di kec benowo: lembaga kelompok nelayan dan mangrove (swadaya) aksinya nyata</p> <p>PERMASALAHAN Di rembang: Tidaka adanya koordinasi oleh penambak dan petani mangrove di suatu pesisir Adanya overlapping kegiatan Tidak adanya penyuluhan yang Kelembagaan masyarakat itu sebagai ujung tombak dalam menentukan implementasi/ kebijakan Rekomendasi: Perguruan tinggi terdekat dapat dijadikan acuan untuk melakukan program2 kegiatan di masyarakat Dapat meilbatkan lembaga kemahasiswaan untuk membantu masyarakat dalam melakukan legiatan di lapangan</p>
--	--

	<p>Brebes Adanya satgas hutan mangrove, area yang sudah dicapai rehabilitasi 180 ha mangrove, ada pembibitan padi di wilayah daerah asin (pertanian) adanya bantuan dari dinas dana operasionalnya kurang</p> <p>permasalahan (pak nyoman): STATUS KEPEMILIKAN LAHAN YANG TIDAK JELAS Contoh Singapura: dia beli pasir untuk menambah lahan Ada ketidakselarasan antara izin2 sari satu instansi ke instansi yang lain Rekomendasi: membangun kesepakatan, uu 27 tahun ..untuk menyusun rencana Tata ruang harus diperdakan sejelas-jelasan Mempercepat di tetapkannya zonasi dengan melibatkan instansi terkait Ada penyimpangan terhadap aturan atura adalah DEMO Tim penegaan regulasi masalah anggaran Rekomendasi: ytim penegaan regulasi diberikan anggaran Prof kamto: Regulasi—Indonesia paling jago dan banyak aturan 35 -60 % gagal karena tidak pernah mau jujur Karena tidak ada naskah akademis Yang membuat atura yang harus mengerti Rekomendasi: Semua regulasi yang dibuat di daerah harus dibuat oleh orang yang memahami dan tau tentang kondisi mangrove dan pesisir (dalam menyusun kebijakan harus orang yang benar benar mengerti / ahli dan tau) Dalam penerapan kebijakan tidak ada tawar menawar harus ditegakkan dengan tegas dan sosialisasikan dengan baik Mahasiswa: Masukan: dana tidak langsung turun ke lapangan, melalui tahapan tahapan sehingga dana yang turun sangat berkurang 32 tahun 90 tentang sempada sungai (greenbelt) Bahwa kebijakan tidak dapat berlaku secara umum di Kebijakan yang mengeneralis harus dapat di mengeneral dan dapat digunakan di semua lokasi Rekomendasi Kearifan local perlu dipertahankan Probolinggo: ada peraturan yang melarang untuk merusak mangrove, sehingga peraturan sangat tegas. Sumatera utara (lubuk larangan): alam yang ada disana doaat dipertahankan Kabupaten Semarang (tidak memiliki pantai) hanya pantai rowomening Rekomendasi untuk di daerah hulu untuk kabupaten yang tidak memiliki pesisir, sehingga tetap harus dilibatkan dalam menentukan</p>
--	--

	<p>regulasi/kelembagaan Hilir harus berhubungan dengan hulu karena saling berkait Isu Hulu dan Hilir BPDAS Rekomendasi: Aktivkan dan libatkan forum das terkait isu hilir dan hulu (Untuk wadah dan mensikronkan beberapa kebijakna) KLH KLH Membuat model2 untuk mensinergiskan hulu dan hilir yang nanti diharapkan dapat di manfaatkan dengan baik di daerah daerah (menyusun rencana bersama untuk mengelola pesisir dan pantai) Rencana pengelolaan hulu dan hilir yang di leading untuk KLH bekerja bersama dengan sektor2 untuk dapat memasukkan kebijakannya dalam RPJMD nya KLH memfasilitasi Pak Agus Tujuan: suistanable (manfaat untuk masyarakat) Untuk menentukan regulasi harus ada public Kepentingan semua masuk Intinya: semua kelembagaan atau stake holders Sector pemerintahan swasta Perhuruan tinggi Public figure Masyarakat ABRI Karena yang paling berpengaruh terhadap kebijakan adalah masyarakat Harus ada sosialisasi kepada masyarakat (kebijakannya) Contohnya: Denda jangan bikin angka yang tidak masuk akal Pak Riyadi: Kebijakan dibidang Anggaran yang tidak jelas. Permasalahan Banyak anggaran yang tidak tepat sasaran Kebijakan dari pusat/ daerah yang tidak jelas sampai orang yang melaksanakan kebijakannya sangat sulit. Untuk menterjemahkan visi misi dan tujuan banyak yang bias. REkomendasi: ABRI MASUK MANGROVE Militer ikut merehabilitasi dalam hutan mangrove. BPDAS BS menjajaki kerjasama formal dengan TNI dalam rangka rehabilitasi Pesisir Stakeholders dapat memberikan kebijakan untuk terlibat dalam rehabilitasi mangrove</p>
--	---